



**REHABILITASI BERBASIS KELEMBAGAAN MELALUI
PENINGKATAN KAPASITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten
Jember)**

**THE INSTITUTIONAL BASED REHABILITATION TROUGHT THE
CAPACITY ENCHANCEMENT FOR PRISONERS
(StudyDeskriptive In Penitentiary Class II A Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

Kunti Dhorifah

140910301015

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2019



**REHABILITASI BERBASIS KELEMBAGAAN MELALUI
PENINGKATAN KAPASITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten
Jember)**

**THE INSTITUTIONAL BASED REHABILITATION TROUGHT THE
CAPACITY ENCHANCEMENT FOR PRISONERS
(StudyDeskriptive In Penitentiary Class II A Jember)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Kunti Dhorifah

140910301015

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta alm. Bapak Ali Imron dan Ibu Indanah
2. Orang tua kandung saya Bapak Nur yatim dan Ibu Ismami
3. Kepada suami tercinta Mukhlason dan anakku tersayang Rayyan Nawang Robbani
4. Guruku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi
5. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Tuhan tidak menuntuk kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang
tanpa henti”

-Cak Nun-



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kunti Dhorifah

Nim : 140910301015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebut sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademis jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 16 Oktober 2019

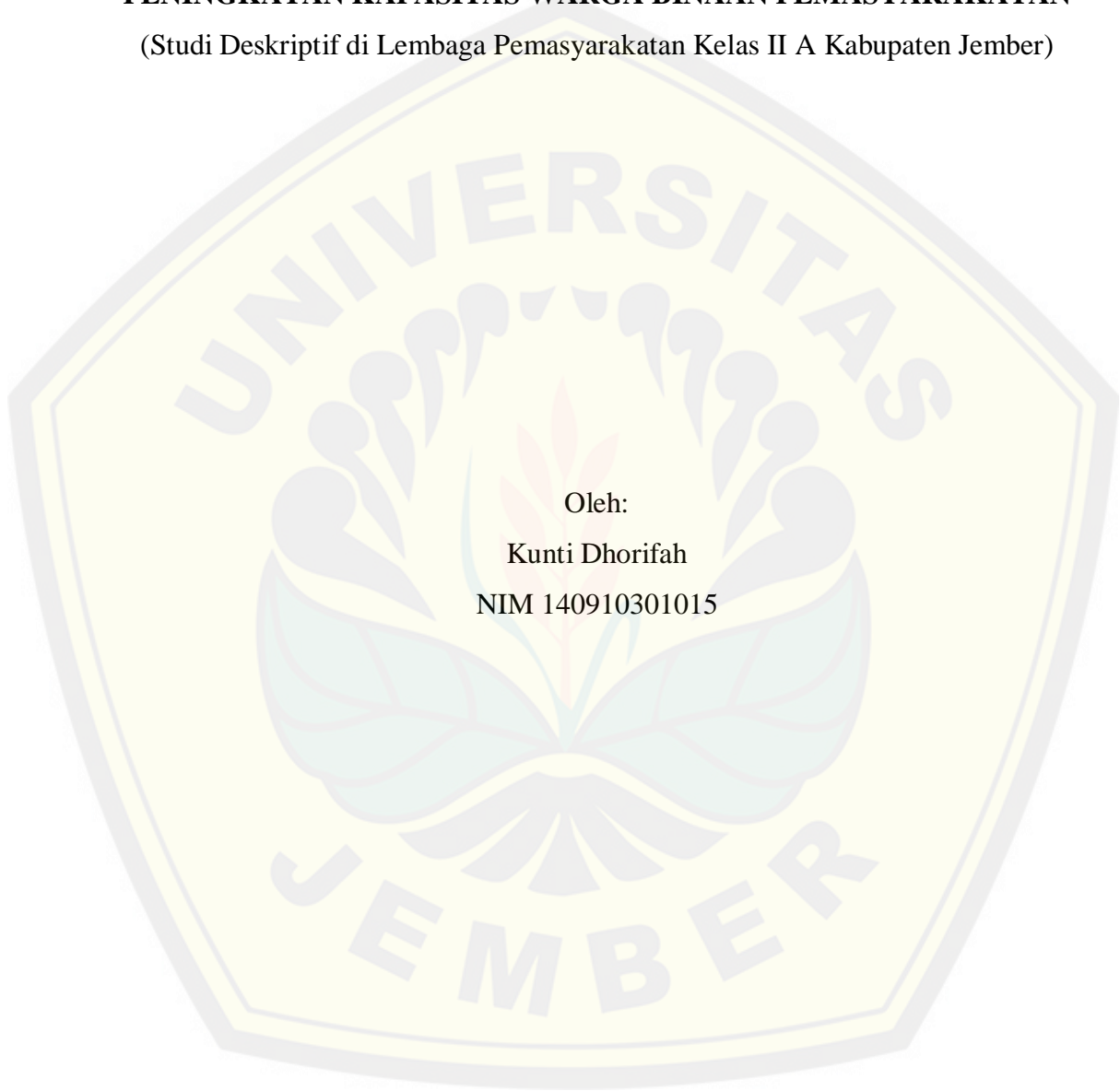
Yang menyatakan,

Kunti Dhorifah
NIM 140910301015

SKRIPSI

**REHABILITASI BERBASIS KELEMBAGAAN MELALUI
PENINGKATAN KAPASITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

(Studi Deskriptif di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Jember)



Oleh:

Kunti Dhorifah

NIM 140910301015

Dosen Pembimbing:

Kris Hendrijanto, S.Sos., Msi

NIP. 197001031998021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sama’i, M.Kes

Kris Hendrijanto, S.Sos., Msi

NIP.195711241987021001

NIP.197309092008121002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Franciscus Adi P., M.Si

Arif, S.Sos., M.AP

NIP. 197309092008121002

NIP. 197603102003121003

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP. 196106081988021001

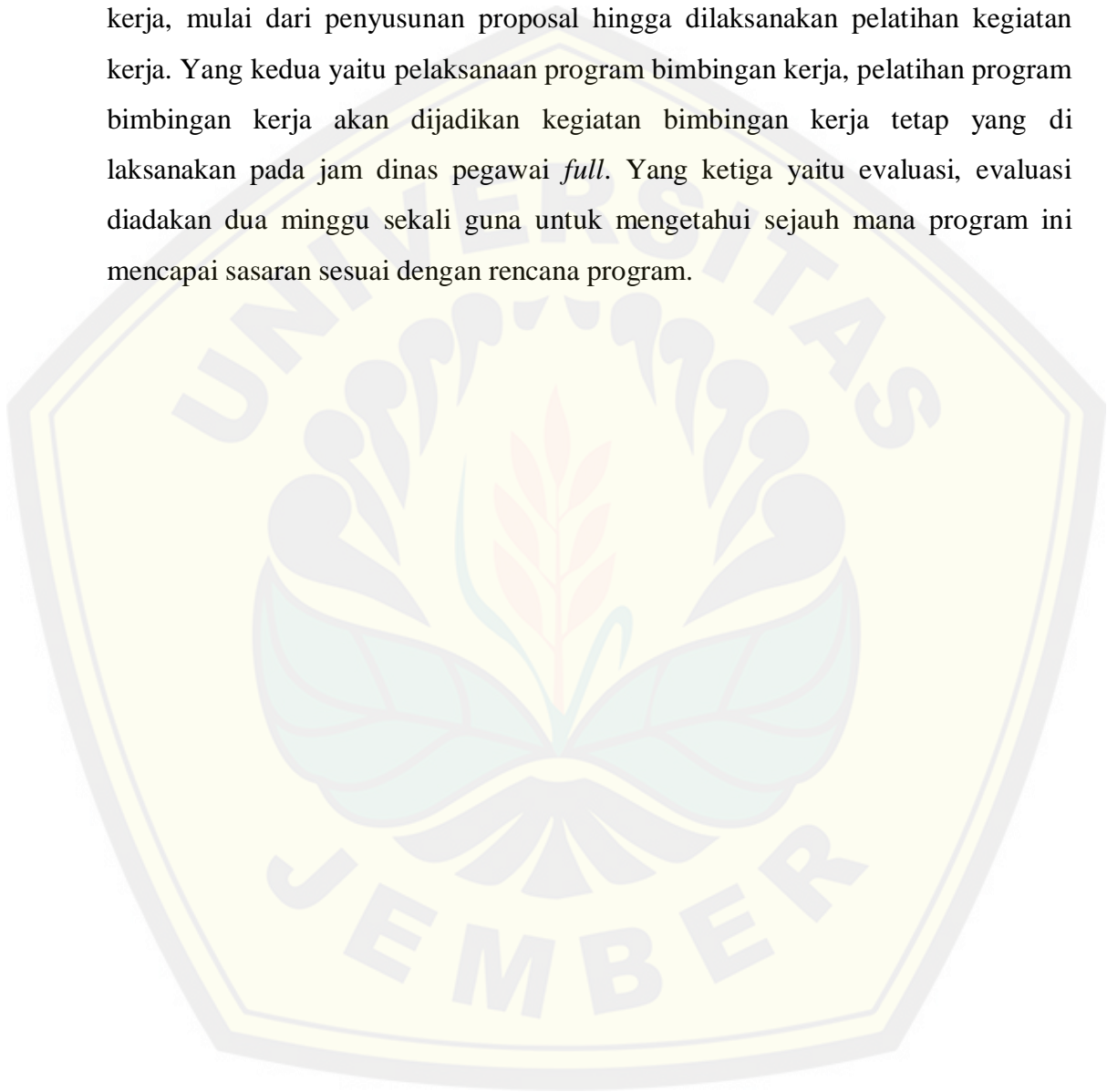
RINGKASAN

“Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember)”, Kunti Dhorifah, 140910301015, 144Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas Warga Binaan Pemasarakatan merupakan salah satu kegiatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember, Rehabilitasi tersebut dilaksanakan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat meningkatkan dan mengembangkan kreatifitasnya, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasaraatan, mereka memiliki keahlian yang dapat mereka jadikan sebagai sumber pendapatan dan tidak melakukan penyimpangan kembali. Rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember ada beberapa macam, salah satunya yaitu Bimbingan Kerja. Kegiatan Bimbingan Kerja di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan kerja yang mayoritas dapat di kerjakan oleh Warga Binaan Pemasarakatan, antara lain : tataboga, *laundry*, *barbershop*, perikanan, pengelasan, kerajinan dari kardus bekas, pertukangan, perkayuan, pembuatan paving blok, dan kerajinan bunga akrilik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan rehabilitasi yang dilaksanakan melalui program bimbingan kerja yang berada di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan tahapan-tahapan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain: yang pertama yaitu perencanaan program bimbingan kerja yang dilakukan oleh petugas bimbingan kerja, mulai dari penyusunan proposal hingga dilaksanakan pelatihan kegiatan kerja. Yang kedua yaitu pelaksanaan program bimbingan kerja, pelatihan program bimbingan kerja akan dijadikan kegiatan bimbingan kerja tetap yang di laksanakan pada jam dinas pegawai *full*. Yang ketiga yaitu evaluasi, evaluasi diadakan dua minggu sekali guna untuk mengetahui sejauh mana program ini mencapai sasaran sesuai dengan rencana program.



PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember)”, dan Karya Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, walaupun usaha untuk menyempurnakannya sudah penulis lakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan konstruktif dari semua pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Bapak Kris Hendrijanto, S.Sos., Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahfud Siddiq, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik dan memberikan banyak pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan atas bantuan untuk kelancara penulis terutama kepada Mas Risqi selaku operator jurusan.
7. Warga Binaan Pemasarakatan serta petugas bagian Bimbingan Kerja yang telah membantu penulis mendapatkan data selama melakukan penelitian.

8. Keluargaku: Bapak Nur yatim, Ibu Ismami, Mama Indanah, Mas mukhlas dan Rayyan yang selalu memberikan energi positif, dukungan dan doa dalam setiap sujudnya.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak ada hentinya menyemangatiku : Abela, Firda, Vita, Aida, Nurul, Hilda dan Eryka
10. Teman-teman kos Jawa 4 no 7ayang telah menjadi keluarga kedua penulis
11. Teman seperjuangan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2014 Universitas Jember
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, partisipasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 16 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

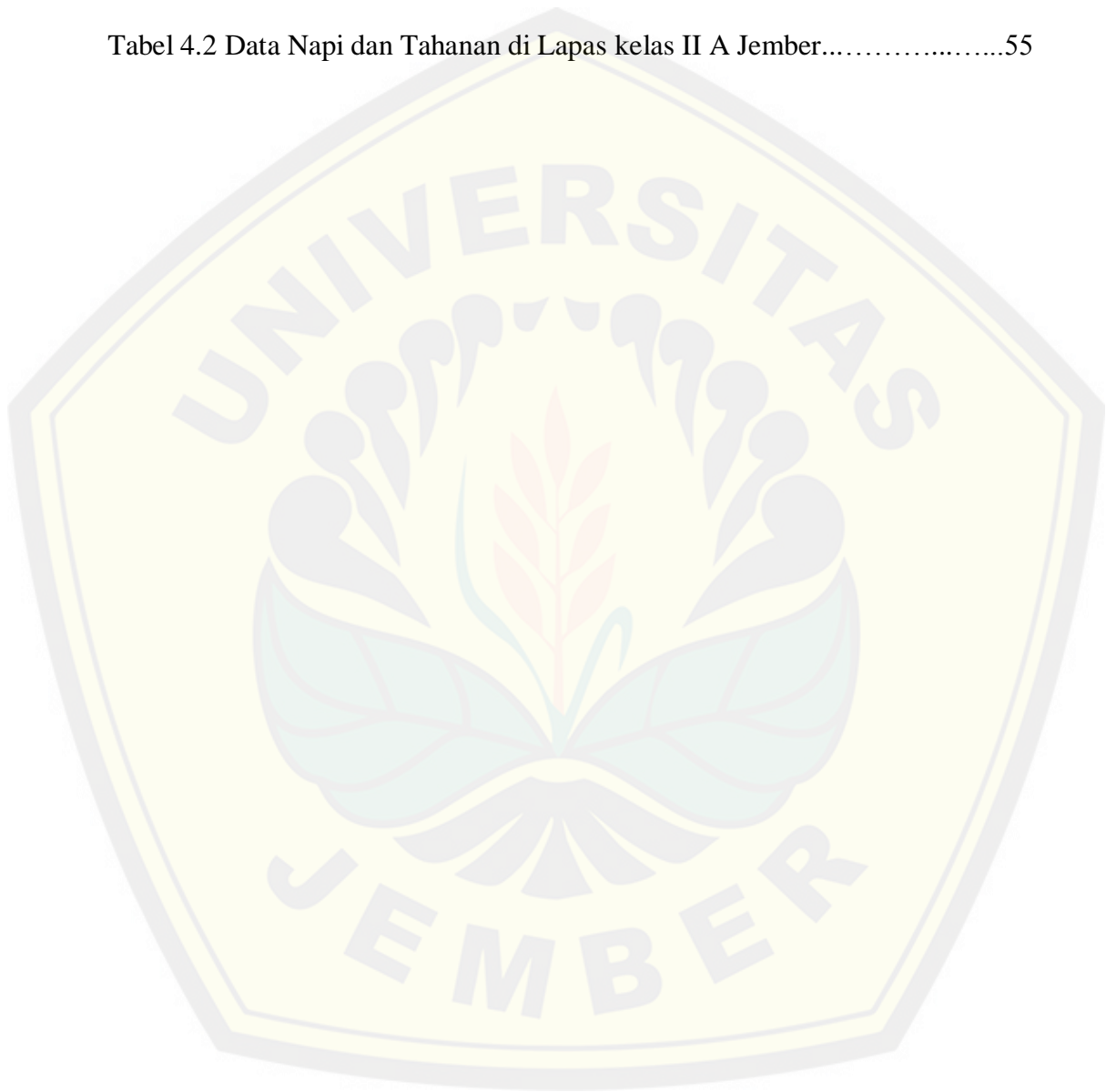
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMANMOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMANPENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Konsep Implementasi.....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi	7
2.1.2 Model Implementasi.....	8
2.1.3 Tahap-tahap Implementasi.....	9
2.2 Konsep Perbuatan Kriminal.....	12
2.3 Konsep Warga Binaan Pemasyarakatan.....	14
2.4 Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	15
2.4.1 Sistem Pembinaan Pemasyarakatan.....	18
2.5 Konsep Lembaga Pemasyarakatan	19
2.5.1 Sistem Lembaga Pemasyarakatan	20

2.6 Konsep Pemberdayaan	22
2.6.1 Proses Pemberdayaan	23
2.6.2 Tujuan Pemberdayaan	24
2.6.3 Indikator Keberdayaan	25
2.6.4 Strategi Pemberdayaan	26
2.6.5 Tahapan-tahapan Pemberdayaan.....	27
2.7 Konsep Rehabilitasi Sosial	29
2.7.1 Pengertian Rehabilitasi	29
2.7.2 Jenis Rehabilitasi	30
2.8 Konsep Pembangunan kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	31
2.8.1 Pembangunan Kapasitas melalui Pelatihan (<i>Training</i>)	32
2.9 Penelitian Terdahulu	34
2.10 Kerangka Berpikir Penelitian	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian	40
3.4 Metode Penentuan Informan	41
3.5 Metode Pengumpulan Data	45
3.5.1 Observasi	45
3.5.2 Wawancara.....	47
3.5.3 Dokumentasi	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	50
BAB 4. PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	52
4.1.1 Sejarah singkat Lembaga Pemasarakatan klas II A Jember	52
4.1.2 Letak Geografis dan kondisi fisik bangunan	52
4.1.3 Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember	54
4.1.4 Struktur Organisasi Lembaga	54

4.1.5 Tugas dan Fungsi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember	57
4.1.6 Data Kepegawaian.....	60
4.1.7 DATA WBP / TAHANAN / ANAK DIDIK.....	62
4.1.8 Uraian Pelaksanaan Tugas	64
4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	69
4.2.1 Program bimbingan kerja	69
4.2.2 Perencanaan Program Bimbingan Kerja.....	70
4.2.3 Pelaksanaan program bimbingan kerja.....	73
4.2.4 Evaluasi Program Bimbingan Kerja.....	82
BAB 5. PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan.....	54
Tabel 4.2 Data Napi dan Tahanan di Lapas kelas II A Jember.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian.....32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lapas kelas II A Jember tahun 2018.....49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Guide Interview

Lampiran B. Transkrip Wawancara Informan Pokok

Lampiran C. Transkrip Wawancara Informan Tambahan

Lampiran D. Analisis Data

Lampiran E. Dokumentasi

Lampiran F. Surat ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

Lampiran G. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Lembaga Pemasyarakata Kelas II A Kabupaten Jember

Lampiran H. Contoh Surat Rekomendasi Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengikuti Program Bimbingan Kerja

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 3. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia pada mulanya bernama penjara, penjara merupakan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Lembaga pemasyarakatan memiliki kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember, Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember biasa disebut dengan Lapas, Lapas kelas II A Jember adalah satu-satunya lapas yang berkategori II A seTapal Kuda (Probinggo, lumajang, bondowoso, situbondo, banyuwangi), dengan kategori tersebut maka kapasitas jumlah hunian standar \leq 500 – 1500 orang (kpsrb.bappenas.go.id).

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember dalam pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memiliki Mou (*Memorandum Of Understanding*) dengan sepuluh lembaga, baik dari unsur pemerintah, swasta, pelaku usaha, pesantren maupun perguruan tinggi. Sepuluh lembaga tersebut antara lain adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Jember, Kantor Kementerian Agama Jember, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jember, Yayasan Sarana Kahuripan, Karisma Potong Rambut dan Salon, Pesantren Darul Ulum, Pesantren Nurul Huda Ambulu, Garwita Institut Jember, serta Asuransi Jiwasraya Cabang Jember. Hal tersebut dilakukan guna untuk pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk pelatihan ketrampilan dan kerajinan, sehingga apabila hukuman yang dijalani telah selesai dan kembali pada masyarakat warga binaan pemasyarakatan tersebut memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember dibedakan menjadi dua yaitu, pembinaan dibagian bimbingan kerja dan pembinaan kepribadian.

Bimbingan kerja merupakan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat untuk warga binaan masyarakat yang hukumannya telah ditetapkan oleh hakim, semua warga binaan diwajibkan mengikuti bimbingan kerja kecuali warga binaan yang memiliki resiko tinggi (teroris), dalam Lembaga Masyarakat Kelas II A Kabupaten Jember warga binaan masyarakat mayoritas adalah tindak pidana narkoba sehingga dapat mengikuti program bimbingan kerja, dan untuk yang resiko tinggi (teroris) sebanyak 2 orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Afifah, SH sebagai Kasubsi Registrasi bahwa narapidana yang ada di Lembaga Masyarakat kelas II A Jember sebagian besar penyalahgunaan narkoba, mayoritas memakai narkoba, sabu-sabu dan obat-obatan terlarang, apabila sudah kecanduan berat maka akan di layar ke Lembaga Masyarakat khusus rehabilitasi narkoba, tapi selama ini belum pernah ada, jadi tidak sampai kecanduan berat, sehingga dapat di rehabilitasi sendiri.

Program bimbingan kerja di Lembaga Masyarakat kelas II A Jember mempunyai berbagai prestasi, diantaranya yaitu: pemecah rekor sendal bagiak terpanjang seIndonesia pada acara perlombaan agustus tahun 2016, pemeran hasil ketrampilan warga binaan masyarakat setiap setahun sekali yang didatangi langsung oleh bupati, mulai tahun 2018 warga binaan masyarakat yang terpilih dapat mengikuti acara Jember Fashion Carnival (JFC) pembuatan kostum di damping oleh Garwita. Program bimbingan kerja berisi program-program pelatihan kerja, program-program tersebut antara lain:

1. *Laundry*
2. Tataboga (penjualan jembem) dan Tataboga (*catering dan bakery*)
3. *Barbershop*
4. Perikanan
5. Pengelasan
6. Kerajinan-kerajinan dari kardus bekas
7. Pertukangan
8. Perkayuan
9. Pembuatan paving blok
10. Kerajinan bunga akrilik

Dari sepuluh kegiatan program bimbingan kerja yang sedang berjalan, peneliti hanya memfokuskan kepada kegiatan tataboga, *Barbershop*, kerajinan – kerajinan yang terbuat

dari kardus bekas serta kerajinan bunga akrilik karena dari sepuluh kegiatan bimbingan kerja yang banyak diminati oleh warga binaan masyarakat adalah kegiatan tersebut. Pertimbangan yang bersifat akademisnya adalah bahwa penelitian ini tidak memfokuskan kepada jenis ketrampilan apa yang dilatihkan, tetapi memfokuskan pada proses atau tahapan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga masyarakat kelas II A Jember melalui kegiatan bimbingan kerja.

Dalam hal ini program bimbingan kerja merupakan salah satu program rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakat kelas II A Jember merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk kemandirian warga binaan masyarakat serta peningkatan kapasitas warga binaan masyarakat. Peningkatan kapasitas adalah salah satu upaya yang digunakan dalam pembangunan manusia. Menurut Suharto (2005:49) tujuan dari adanya peningkatan kapasitas adalah untuk membimbing dan membantu dalam memperoleh informasi, pengetahuan atau ketrampilan-ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya. Upaya dalam pembangunan kapasitas menjadi bagian terpenting dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah strategi yang mampu mewujudkan pembangunan kapasitas dalam pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) menjadi sumber daya yang berkualitas.

Rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat kelas II A Jember melalui program bimbingan kerja tersebut semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga binaan masyarakat serta kemandirian warga binaan masyarakat. Hal ini merupakan pendorong bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi warga binaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan pemenuhan kesejahteraannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 11 pasal 1 ayat 1, tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi: "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana proses rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan untuk mencapai kesejahteraan. Karena dengan proses rehabilitasi tersebut, warga binaan pemasyarakatan dapat berhasil meningkatkan kapasitas diri serta hidup mandiri. Hal tersebut terbukti bahwa rehabilitasi yang berbentuk program bimbingan kerja diaktualisasikan melalui beberapa kegiatan yang dapat memberikan implikasi positif yaitu salah satunya warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan kapasitasnya.

Maka dalam hal ini program bimbingan kerja merupakan salah satu bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember guna untuk peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan, rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk bimbingan kerja dapat menjadi salah satu pilar yang penting dalam pembangunan karakter para warga binaan. Karena hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pembinaan yang di laksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember dapat meningkatkan kapasitas warga binaan pemasyarakatan dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup yang dijalani oleh warga binaan pemasyarakatan sehingga pada saat hukuman yang dijalani telah selesai, warga binaan pemasyarakatan kembali kepada masyarakat dengan persiapan yang telah di laksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mantan warga binaan pemasyarakatan dapat hidup mandiri sehingga tidak mengulangi kesalahannya kembali.

1.2 Rumusan Masalah

Bila dilihat dari latar belakang Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan merupakan seseorang yang melakukan tindakan menyimpang sehingga harus kehilangan kemerdekaannya karena berada dalam jeruji besi setelah putusan hukuman yang dijatuhkan oleh kejaksaan. Warga binaan pemasyarakatan biasa disebut dengan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat narapidana disiksa melainkan dibina, dibimbing dengan harapan narapidana dapat berubah dan berbau kembali secara wajar ditengah-tengah keluarga dan masyarakat. Pembinaan mempunyai arti

membangun atau memperbaiki suatu keadaan dari keadaan sebelumnya (Poerwadarminta, 1976:955).

Namun kenyataannya yang ada dimasyarakat, tidak semua mantan narapidana yang baru keluar dari penjara menjadi berkelakuan baik di keluarga maupun masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan pendapat negatif terhadap pembinaan (bimbingan kerja) di Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat beranggapan bahwa tidak adanya penanganan yang serius dari pihak lembaga pemasyarakatan. Dari fenomena tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan yang seharusnya dapat membina narapidana untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka dapat di ambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Program Bimbingan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian hendaknya mempunyai tujuan yang jelas dan tegas. Jika tidak ada tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami hambatan dalam pengumpulan data, sehingga terjadi penyimpangan yang membuat penelitian tersebut tidak relevan. Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, maka **“Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dengan cara mendeskripsikan bagaimanatahapan-tahapan Rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Program Bimbingan Kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember”**.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan bermanfaat pada objek yang di teliti, peneliti maupun pihak yang terkait dengan penelitian ini. Melalui penelitian yang berjudul **“Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember”** di harapkan akan memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan informasi dan kajian bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tertarik mengenai kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian oleh para pemerhati, akademisi, pihak-pihak lain terkait dengan pengembangan kesejahteraan sosial yang khususnya dalam pengembangan psikologi dan kriminologi.
3. Dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain dengan tema yang sama dan dapat dijadikan pengembangan penelitian lebih lanjut dari peneliti lain.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Snelbecker dalam Moleong (2014: 34) mengemukakan bahwa dalam mendefinisikan teori, proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu sehingga dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan dasar-dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang di amati. Sehingga landasan teori tersebut sebagai acuan untuk menggambarkan dan mendapatkan teori-teori yang relevan serta berkaitan dengan penelitian yang ada.

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:68), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Melaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Donald dan Carl El dalam Widodo (2006:86) juga menguraikan batasan implementasi sebagai suatu tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun individu swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster dalam wahab (2004:64) adalah:

“konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*, dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”

Menurut Wahab (2004:65) pengertian implementasi sebagai berikut:

“implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat-pejabat, pejabat kelompok, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Berdasarkan dua pengertian diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam suatu kebijakan. Kebijakan merupakan suatu usaha dan tindakan-tindakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan masyarakat semata-mata bertujuan untuk melangsungkan kehidupan serta pengerahan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya. Menurut Friedlander dalam Adi (2008:47) bahwa:

“kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan”

Dalam hal ini, Friedlander membangun suatu konsep tentang upaya sistemik yang dilakukan oleh beberapa institusi baik formal (pemerintah) dan informal (swasta) yang bersinergi dalam mengarahkan kegiatan individu dan kelompok menjadi bergaya sehingga segala kebutuhannya bisa dipenuhi, standar hidup yang memuaskan.

Seperti yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember, mengadakan kegiatan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mandiri) yang aktif dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 2006 setiap tiga kali dalam satu minggu. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan yang sejahtera serta kemandirian untuk warga binaan pemsarakatan.

2.1.2 Model Implementasi

Dengan memahami model-model implementasi pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-model implementasi. Ada dua jenis pemilahan mode implementasi menurut Pulz dan Treib dalam Agung (2011:15) yaitu pertama adalah implementasi program yang berpola dari “atas ke bawah” (*top down*) dan dari “bawah ke atas” (*buttom up*), atau pemilahan

implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentives*).

Menurut Parsons (2008:87) bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat program dan pelaksana program. Sedangkan menurut Smith dalam Islamy (2001:45), implementasi program dipandang sebagai suatu proses atau alur program dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Model Smith ini memandang proses implementasi program dari proses program dalam perspektif perubahan sosial dan politik, dimana program yang dibuat oleh pemerintah ataupun swasta dalam konteks penelitian ini adalah program bimbingan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember yang bertujuan untuk memberdayakan warga binaan pemsarakatan agar warga binaan pemsarakatan apabila hukumannya telah selesai dan kembali kepada masyarakat dapat hidup secara mandiri serta tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang dan dapat diterima oleh masyarakat. Program tersebut merupakan suatu kegiatan dan usaha peningkatan kesejahteraan sosial dengan memberikan pelayanan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi penyandang masalah untuk membantu sasaran dalam kesulitan dan memenuhi kebutuhannya.

2.1.3 Tahap-tahap Implementasi

Tahapan implementasi program menurut Rendall B. Ripley dalam Soekarno (2000:250) melalui enam langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum pelaksanaan program terlebih dahulu diadakan terhadap apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahapan ini sebagai upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pengembangan kontak yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian tujuan program.

3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dimana menggambarkan secara umum yang terkait dengan subjek pembahasan.

4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan dibahas dimana melakukan perencanaan dalam memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada suatu masalah tertentu.

5. Pelaksanaan

Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi

Dengan evaluasi maka suatu program atau suatu kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat.

7. Terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap mandiri.

Adapun Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn dalam Wahab (2004:36) menunjukkan bahwa tahapan implementasi yaitu sebagai berikut:

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. menentukan standar pelaksanaan
- c. menentukan biaya yang akan digunakan beresta waktu pelaksanaan.

Tahap II : merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta meode.

Tahap III terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. menentukan jadwal
- b. melakukan pemantauan

- c. mengasakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dan segera

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi program akan selalu berkaitan dengan tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan seperti yang diterapkan dalam implementasi program bimbingan kerja dalam upaya memberdayakan warga binaan pemasyarakatan. Pengertian implementasi program, model implementasi program dan tahap-tahap implementasi yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai suatu proses atau alur program yang terfokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang dalam konteks penelitian ini yaitu berupa program bimbingan kerja yang dijalankan guna untuk pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat bisa terentang mulai dari kegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan (aspek ekonomi) hingga peningkatan kapasitas intelektual atau ketrampilan sosial (aspek pendidikan) dan kapasitas fisik (aspek kesehatan). Dalam proses pertolongannya, peranan pekerja sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan, dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

2.2 Konsep Perbuatan Kriminal

Dalam buku Kriminologi yang di tulis oleh Ende Hasbi Nassaruddin, S.H.,M.H (2016: 76-77) Istilah kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) adalah seorang antropologi prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Secara harafiah, kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan, dan “logos” yang berarti pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang di lakukan oleh seseorang yang dapat mengikutsertakan orang lain dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, menurut ketentuan hukum pidana.

Dari hal tersebut maka kejahatan memiliki berbagai sudut pandang mengenai konsep kejahatan tersebut, yaitu :

- a. Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian, perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana tidak tergolong kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan yang dipandang melanggar norma sosial.
- b. Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat atau adat istiadat. Perbuatan kejahatan tersebut dapat diasumsikan sebagai perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, menghasilkan kegelisahan dalam kehidupan masyarakat tertentu, sehingga masyarakat mencela dan menolak perbuatan itu.

Menurut Abdulsyani (2016: 115) dalam buku kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek yuridis, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dengan demikian, jika seseorang melakukan kejahatan tetapi belum dijatuhi hukuman, ia tidak dianggap sebagai penjahat.

2. Aspek sosial, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Aspek ekonomi, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Kejahatan identik dengan melanggar hukum dan ditetapkan oleh pengadilan sebagai perbuatan pidana yang dikenakan sanksi hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi, pelanggar hukum belum dapat dikatakan terdakwa apabila belum ada keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penyebab kejahatan dalam pandangan sosiologis terbagi atas tiga kelompok pendapat, yaitu:

1. Kriminalitas itu disebabkan pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku;
2. Kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri;
3. Kriminalitas itu disebabkan, baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Jadi, kejahatan tidak terjadi semata-mata karena diri sendiri tetapi banyak faktor atau motif yang mendorong seorang untuk melakukan tindak kejahatan, menurut W.A Bonger (1982) dalam buku kriminologi yaitu:

1. Memuaskan kecenderungan keserakahan;
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual;
3. Salah-asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya;
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru;
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal;
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Pakar kriminologi Van S. Lambroso, dengan teori Lambroso (Topo & Zulfa. 2010) dalam buku kriminologi, menyebutkan sebab-sebab kejahatan seseorang hanya dapat

ditemukan dalam bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa perbuatan yang tergolong dalam perbuatan kriminal antara lain:

- a. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, dan pengracunan sampai mati;
- b. Perampasan, perampokan, penyerangan, dan penggarongan;
- c. Pelanggaran seks dan pemerkosaan;
- d. Maling, mencuri;
- e. Pengancaman, intimidasi, dan pemerasan;
- f. Pemalsuan, penggelapan, dan fraude;
- g. Korupsi, penyogokan, dan penyuapan;
- h. Pelanggaran ekonomi;
- i. Penggunaan senjata api dan perdagangan gelap senjata-senjata api;
- j. Pelanggaran sumpah;
- k. Bigami yaitu kawin rangkap satu saat;
- l. Kejahatan-kejahatan politik;
- m. Penculikan;
- n. Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Jadi, tindakan kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditetapkan atau dapat disebut dengan melanggar hukum, hal tersebut terjadi karena beberapa motif atau faktor yang telah dijelaskan diatas, dan apabila tindakan kriminalitas belum ada keputusan pengadilan untuk hukuman tindakan tersebut, maka tindakan tersebut belum dikatakan tindakan kriminalitas.

2.3 Konsep Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan seorang yang telah melakukan tindakan kriminal yang telah ditentukan vonis hukumannya dan sebagian kemerdekaannya diambil karena orang tersebut berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan biasa disebut dengan narapidana.

Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut Harsono dalam Wijaya (2005:35) yang disebut narapidana adalah “manusia yang menjalani masa krisis tengah berada di persimpangan jalan, yang telah mengalami disosialisasi dengan masyarakat dan sedang merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau rumah”

Menurut Adi Hamzah (1985:33) Dalam rancangan KUHP nasional, telah di atur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Jadi narapidana adalah setiap individu yang telah melanggar hukum dan telah di vonis oleh hakim untuk menjalani hukuman penjara atau menjalani bimbingan di lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2.4 Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Poerwadarminta (1976:955) pembinaan adalah membangun atau memperbaharui suatu keadaan dari keadaan sebelumnya. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah seorang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang telah ditentukan vonis hukumannya dan sebagian kemerdekaannya di ambil karena orang tersebut harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina dan dibimbing agar sadar akan kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan kembali. Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan agar disaat mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak, atau dalam bertingkah laku.

Seperti yang telah dijelaskan di Konsep Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan biasa disebut dengan narapidana. Menurut Harsono (1995:51) pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, antara lain:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi dirinya sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah perubahan yang positif.
2. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.
3. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
4. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana.

Dalam pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan ada 3 macam pembinaan menurut Ibrahim (2005:33), yaitu:

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental ini dimaksudkan untuk membantu memperoleh keseimbangan emosi guna mengatasi problem mental yang ada. Pembinaan mental ini perlu sekali diberikan karena setiap narapidana mempunyai problem mental yang harus diatasi, antara lain:

- a. Perasaan bersalah terus menerus
- b. Perasaan kurang bisa mengontrol emosi

- c. Perasaan selalu diatur
- d. Perasaan rendah diri dan lain sebagainya

Adapun dengan adanya pembinaan mental tersebut akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Narapidana dapat mengetahui perbuatan baik dan buruk
- b. Narapidana akan memiliki rasa penyesalan atas perbuatannya yang melanggar hukum
- c. Narapidana dapat memperoleh ketenangan batin

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial ini dimaksudkan untuk membantu memperoleh dan mengembangkan pribadi serta hidup bermasyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembinaan sosial ini adalah

- a. Membantu narapidana mengembangkan pola tingkah laku yang positif
- b. Menanamkan rasa percaya diri sendiri dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk
- c. Menciptakan dan mempertahankan keserasian hubungan narapidana dengan keluarga, petugas, dan sesama narapidana serta masyarakat
- d. Memupuk rasa tanggung jawab sosial

3. Pembinaan Ketrampilan

Pembinaan itu dimaksudkan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki, serta memperoleh keahlian dan ketrampilan sesuai kebutuhan lingkungannya. Adapun manfaat yang diperoleh narapidana dari pembinaan ketrampilan ini adalah :

- a. Narapidana mendapatkan pengetahuan yang dapat menambah kecerdasan
- b. Narapidana dapat menguasai bidang ketrampilan tertentu
- c. Membentuk tenaga kerja produktif, mampu bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan halal
- d. Memupuk rasa tanggung jawab sosial

2.4.1 Sistem Pembinaan Pemasarakatan

Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemsarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemsarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemsarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemsarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemsarakatan, warga binaan pemsarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

(repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di lakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

2.5 Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia pada mulanya bernama penjara, penjara merupakan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 3 di sebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan juga memiliki kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari hal tersebut dapat kita lihat sekilas mengenai perbedaan tujuan dan fungsi dari penjara ke lembaga pemasyarakatan, dimana saat ini lembaga pemasyarakatan berperan dalam pengembalian keberfungsian sosial pelaku tindak kriminal.

Dari hal tersebut konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara juga dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. (dwija, 2006:97).

2.5.1 Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi (Peraturan Kementrian Hukum dan Ham Nomor M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011 tentang rencana induk pembangunan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU No 12/1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 2).

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar, baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomer 12 tahun 1995 yang berisi:

- a. Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. Bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. Bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas dapat dapat dicermati bahwa dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan pada penyiksaan dan penghukuman bagi pelaku tindak kejahatan, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan kepada pengayoman dan pembinaan sehingga dapat menjadikan warga binaan sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Sebenarnya dapat kita lihat secara jelas inti dari tujuan lembaga pemasyarakatan yakni untuk membuat para pelaku tindak kejahatan menjadi berdaya dan mampu memimpin diri mereka sendiri.

2.6 Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Unsur utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat, kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga belum optimal.

Menurut Sunyoto Usman dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Ife yang dikutip dalam buku Edi Suharto (1995:61-64) mengatakan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan aktivitas ekonomi dengan kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

Menurut Suharto (2014: 58) pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan
- b) Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan atau butuhkan

- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.6.1 Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan atau *empowerment* Menurut Korten 1987 dalam (Soetomo 2014:7) memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif tetapi juga dari dalam dimensi generatif. Dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang lebih menekan kepada proses, tanpa bermaksud menafsirkan hasil dari pemberdayaan itu sendiri, kaitannya dengan proses ialah partisipasi atau keterlibatan dalam setiap tahapan sangat di perlukan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2008, 70-75) bahwa pemberdayaan menekankan kepada proses *goal* yaitu yang memiliki tujuan untuk berorientasi kepada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara konferhensif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri sesuai prinsip demografis, dengan menekan kepada proses, maka pemberdayaan memiliki proses sebagai berikut:

1. Penyadaran

Pada tahap pertama, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas atau kelompok agar mereka mengerti kegiatan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka dan dapat dilakukan secara mandiri.

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan komunitas atau individu perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya, tahap ini sering disebut *capacity building*, yang terdiri dari pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.

3. Pendayaan

Pendayaan dengan target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperoleh, tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan tidak hanya terletak pada tataran individu tapi juga kolektif, namun karena proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antar lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi, maka kemampuan individu untuk berkumpul dan membentuk kelompok merupakan teknik pemberdayaan paling efektif karena didalamnya terjadi diaolog yang dapat menumbuhkan dan memperkuat solidaritas, kesadaran, identitas untuk menyadari kepentingan bersama (Tjokrowinoto, 1996). Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah melalui tahapan tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat terdapat suatu proses pemberdayaan. Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

2.6.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Jamasy (2004) bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya dan memiliki daya, kekuatan dan kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan diri. Terjadinya keberdayaan pada aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang di cita-citakan dalam masyarakat serta ketrampilan yang memadai dapat menjadikan pemberdayaan tersebut lebih mudah terjadi. Secara tidak langsung, pemberdayaan ini dilakukan melalui proses memampukan masyarakat agar memiliki *bargaining position* dengan relasi sosialnya. Melalui proses sosial, maka kemampuan ini akan memberikan

kekuatan sinergis dalam reproduksi sosial sehingga akan berimbas pula dalam menciptakan kemampuan ekonominya.

Seperti halnya pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kabupaten Jember yang bertujuan untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan agar apabila telah keluar dapat bersosialisasi dengan baik sehinggalah dapat di terima kembali dalam masyarakat serta dapat hidup mandiri atau memberdayakan dirinya sendiri. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai berubah sikap dari yang kurang baik menjadi baik yang dapat di gunakan sebagai pelindung.

2.6.3 Indikator Keberdayaan

Selain hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat terdapat indicator keberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipasi (Suharto, 1997:215). Parsonet.al. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indicator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan

di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), dan kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*) (Suharto, 2004).

2.6.4 Strategi Pemberdayaan

Parson *er.al.* (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dengan klien dalam setiap pertolongan seseorang. Meskipun pemberdayaan seperti ini bukan strategi utama dalam pemberdayaan. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu aras mikro, aras makro dan aras mezzo.

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan umumnya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

b. Aras Makro

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Mezzo

Pendekatan ini dapat disebut sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.6.5 Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang harus ada dalam pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Menurut Adi (2013: 179-188) ada beberapa tahapan yang dibahas secara rinci dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Tahap *Assesment*

Tahapan ini dapat dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat dan juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahapan ini, petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen perubahan melakukan identifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (*feld needs*), dengan melibatkan masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada. Tahapan ini memiliki penekanan pada faktor identifikasi masalah dan sumber daya yang ada dalam sebuah wilayah yang akan menjadi basis pemberdayaan serta pelaksanaan program.

b. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini pendamping masyarakat sebagai agen perubahan (*change agent*) mencoba melibatkan masyarakat untuk memikirkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang lebih diprioritaskan. Kemudian masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah mereka. Dalam tahap ini dipikirkan secara mendalam agar program pemberdayaan yang ada nantinya tidak melulu berkisar pada program (*charity*) saja dimana itu tidak memberikan manfaat secara pasti dalam jangka panjang.

c. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Tahapan ini, ada kerjasama antara masyarakat, petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan pihak lain (*stakeholder*). Petugas atau pendamping masyarakat membantu masyarakat untuk merancang atau mendesain gagasan mereka atau alternative program yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah mereka dalam bentuk tulisan, terutama apabila ada

kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Disini masyarakat telah menjabarkan secara rinci dalam bentuk tulisan tentang apa-apa yang mereka laksanakan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Tahap Implementasi Program

Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan lapangan bila tidak ada kerjasama yang baik antara petugas dan pendamping masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*) dengan masyarakat maupun antar warga masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen perubahan dan antar warga masyarakat itu sendiri.

e. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahapan ini memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*) terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan masyarakat. Tahapan ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi.

f. Tahap Terminasi

Tahapan terminasi adalah sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*) atau dapat disebut juga dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai tahap pemutusan hubungan antara petugas atau pendamping masyarakat dengan masyarakat yang menjadi basis program pemberdayaan ketika itu. Petugas pun tidak keluar dari komunitas secara total, melainkan ia akan meninggalkan secara bertahap.

Jadi, pendekatan merupakan awal mula dari pengembangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi program. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program ini memiliki poin utama yaitu adanya suatu keberlanjutan, dimana keberlanjutan tersebut tidak hanya ada selama agen perubahan ada bersama komunitas sasaran, tetapi juga setelah agen perubahan memutuskan hubungan dengan komunitas sasaran.

2.7 Konsep Rehabilitasi Sosial

2.7.1 Pengertian Rehabilitasi

Menurut Tavip dalam Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis tentang pelaksanaan *Therapeutic community* dan Rehabilitasi Terpadu bagi Narapidana (2009:31) dalam Hendry menyatakan bahwa, program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Kegiatan rehabilitasi yang diberikan yaitu berupa bantuan kepada peserta atau pasien rehabilitasi. Usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi kepada pemberian kesempatan kepada peserta untuk mencoba dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi merupakan pengembalian fungsi dari peserta rehabilitasi, sedangkan pengembangan ditujukan untuk menggali atau menemukan dan memanfaatkan kemampuan peserta yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi diri dan fungsi sosial dimana ia berada.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember mempunyai peran penting dalam pemberian rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani proses peradilan, warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember mayoritas adalah penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Afifah, SH sebagai Kasubsi Registrasi dibawah ini:

“narapidana yang ada disini sebagian besar penyalahgunaan narkoba dek, paling banyak ya sabu-sabu, obat-obatan terlarang itu, kalau yang sudah kecanduan berat nanti kami layar ke lapas khusus rehabilitasi narkoba, tapi selama ini belum pernah ada, jadi gak sampai kecanduan, kita bisa nanganin sendiri”

pemberian rehabilitasi kepada warga binaan pemasyarakatan ada berbagai macam yang meliputi rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis, hal tersebut dilaksanakan untuk pemenuhan hak asasi manusia warga binaan pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 pasal 54 pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan sebagai berikut:

“setiap orang yang ketergantungan Narkoba wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu narkoba), yakni seseorang yang sadar dan sengaja mengkonsumsi narkoba dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba. Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi yang diperuntukkan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkoba yang ketergantungan dengan narkoba, terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkoba. Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial”

2.7.2 Jenis Rehabilitasi

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No 22 tentang narkoba, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk pemulihan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Melihat jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang semakin bertambah, maka layanan rehabilitasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu meliputi:

A. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjukan oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah

maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

B. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Bekas pecandu narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi pecandu narkoba dapat dilakukan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial adalah lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini rehabilitasi yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pengobatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan pidana narkoba. Upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan dapat mengembalikan keberfungsian sosial bagi warga binaan pemasyarakatan dengan pidana narkoba.

2.8 Konsep Pembangunan kapasitas(*Capacity Building*)

Pembangunan manusia menjadi sangat penting dilakukan mengingat pembangunan nasional yang telah direncanakan untuk pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2005:5) “fungsi dalam pembangunan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin kerja pembangunan. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan nasional yang direncanakan tersebut dapat berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global”. Pembangunan manusia melalui berbagai upaya telah mendorong dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat seutuhnya. Tidak hanya memberikan pelayanan berupa materi atau *charity*. Akan tetapi, juga pada progress berubahan *minseddari* pada masyarakat itu sendiri agar lebih kritis terhadap perubahan dalam lingkungan sekitar yang terjadi secara cepat dan tidak terkendali.

Salah satu upaya yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah pengembangan kapasitas (*Capacity Building*). Menurut Suharto (2005:49) tujuan dari adanya Capacity Building adalah untuk membimbing dan membantu dalam memperoleh informasi, pengetahuan atau ketrampilan-ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya. Upaya dalam pembangunan kapasitas menjadi bagian terpenting dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah strategi yang mampu mewujudkan pembangunan kapasitas dalam pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) menjadi sumber daya yang berkualitas. UNDP dan *Canadian International Development Agency* (dalam Tim STIALAN, 2012) memberikan pengertian peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks luas dalam cara yang berkelanjutan. UNDP juga memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu:

1. Tenaga Kerja (dimensi human resource), yaitu kualitas sumber daya manusia dan cara sumber daya manusia dimanfaatkan.
2. Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang atau gedung
3. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentu kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta system informasi manajemen.

Ada cara atau metode yang dilakukan guna mengembangkan kapasitas sumber daya manusia sebagai actor perubahan dan pembangunan, agar perubahan dan pembangunan yang terlaksana dapat menuju pada perubahan yang lebih baik, salah satu cara atau metode yang dilakukan yaitu melalui pelatihan (*training*).

2.8.1 Pembangunan Kapasitas melalui Pelatihan (*Training*)

Pembangunan kapasitas dirasa sangat dibutuhkan oleh individu, kelompok, organisasi maupun instansi sebagai wujud peningkatan serta penguatan terhadap potensi yang dimiliki agar dapat digunakan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Dalam hal ini

pembangunan dan peningkatan kapasitas dapat diwujudkan melalui pelatihan (*training*). *Training* merupakan salah satu proses belajar dan mengajar, dalam proses ini individu, kelompok, organisasi maupun instansi diajarkan sebuah kemampuan serta keahlian, selain memberikan pengetahuan dan juga ketrampilan mereka dituntut untuk mampu membagikan pengetahuan dan ketrampilan tersebut kepada orang lain. Hal itu dilakukan sebagai proses penguatan atas pengetahuan dan ketrampilan yang telah didapatkan. Sesuai dengan pendapat Wexley dan Yuki (dalam As'ad, 1998:70) menyatakan bahwa:

“latihan (*training*) dan pengembangan adalah istilah-istilah yang menyangkut usaha-usaha yang direncanakan dan diselenggarakan agar supaya dicapai penguasaan akan ketrampilan, pengetahuan dan sikap relevan terhadap pekerjaan”.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelatihan (*training*) menurut Dale Yoder (dalam As'ad, 1998:70) agar pelatihan dapat berhasil dengan baik maka harus memperhatikan delapan faktor berikut ini:

1. *Individual Differences*
2. *Relation To Job Analysis*
3. *Motivation*
4. *Active Participations*
5. *Selections of trainers*
6. *Selections of trainees*
7. *Trainer Training*
8. *Training method*

Kedelapan faktor tersebut penting untuk diperhatikan dalam memberikan pelatihan (*training*), karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelatihan yang diadakan. Pelatihan (*training*) dapat juga diterapkan oleh lembaga masyarakat (lapas) dalam meningkatkan kemampuan atau kapasitas para warga binaan masyarakat agar menjadi actual dalam kehidupannya. Untuk mendukung pembangunan kapasitas warga binaan masyarakat dapat dilakukan “motivasi”. Pemberian motivasi menjadi salah

satu upaya terbesar dalam proses keberhasilan peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Dalam mendapatkan informasi-informasi yang mendukung sebuah penelitian, maka penelitian harus mampu menelaah kepustakaan yang meliputi didalamnya adalah tinjauan penelitian terdahulu. Adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif-perspektif objektif.

Adapun 2 penelitian yang dijadikan acuan yaitu yang pertama oleh Dian Rusita (2013) dari Fisip Universitas Jember dengan judul “Proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso” dan penelitian kedua yaitu oleh Nur Indah (2014) dari Fisip Universitas Jember dengan judul “upaya tahanan pendamping (tamping) membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan”. Agar lebih mudah untuk memahami kedua penelitian terdahulu tersebut maka dapat disajikan *table* sistematis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Telaah Penelitian terdahulu

<p>Judul</p>	<p>Proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso</p>	<p>Upaya tahanan pendamping (tamping) membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan tahanan residivis, dimana pembinaan yang dilakukan lembaga untuk menghindari munculnya tahanan residivis maka sebagai langkah awal lembaga melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum terhadap narapidana baru, dengan hal ini diharapkan para tahanan dapat mengerti kesalahan yang ia lakukan dan paham mengenai macam-macam tindakan yang dapat melanggar hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penentuan informan secara <i>snowball</i></p>	<p>pembinaan warga binaan, dalam penelitian ini tahanan pendamping merupakan para narapidana yang di percaya oleh petugas untuk mengawasi tahanan lainnya. Tugas tamping dalam hal ini di bagi menjadi 5 wilayah kerja yakni : perkantoran, kebersihan, keamanan, kesehatan, dan dapur. Jadi dalam penelitian ini memberikan informasi mengenai pendampingan dalam Lapas yang di lakukan oleh petugas Lapas.</p>
<p>Persamaan dan perbedaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Persamaan dengan penelitian ini adalah pembinaan narapidana •Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fenomena 	<p>Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Persamaan dengan penelitian ini adalah

	<p>yang di ambil yaitu proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso</p>	<p>pembinaan narapidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fenomena yang di ambil yaitu upaya tahanan pendamping (tamping) membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan.
--	---	---

2.10 Kerangka Berpikir Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka berpikir yang tujuannya yaitu untuk menarik suatu kesimpulan dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen, apabila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga pernah dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2015:60).

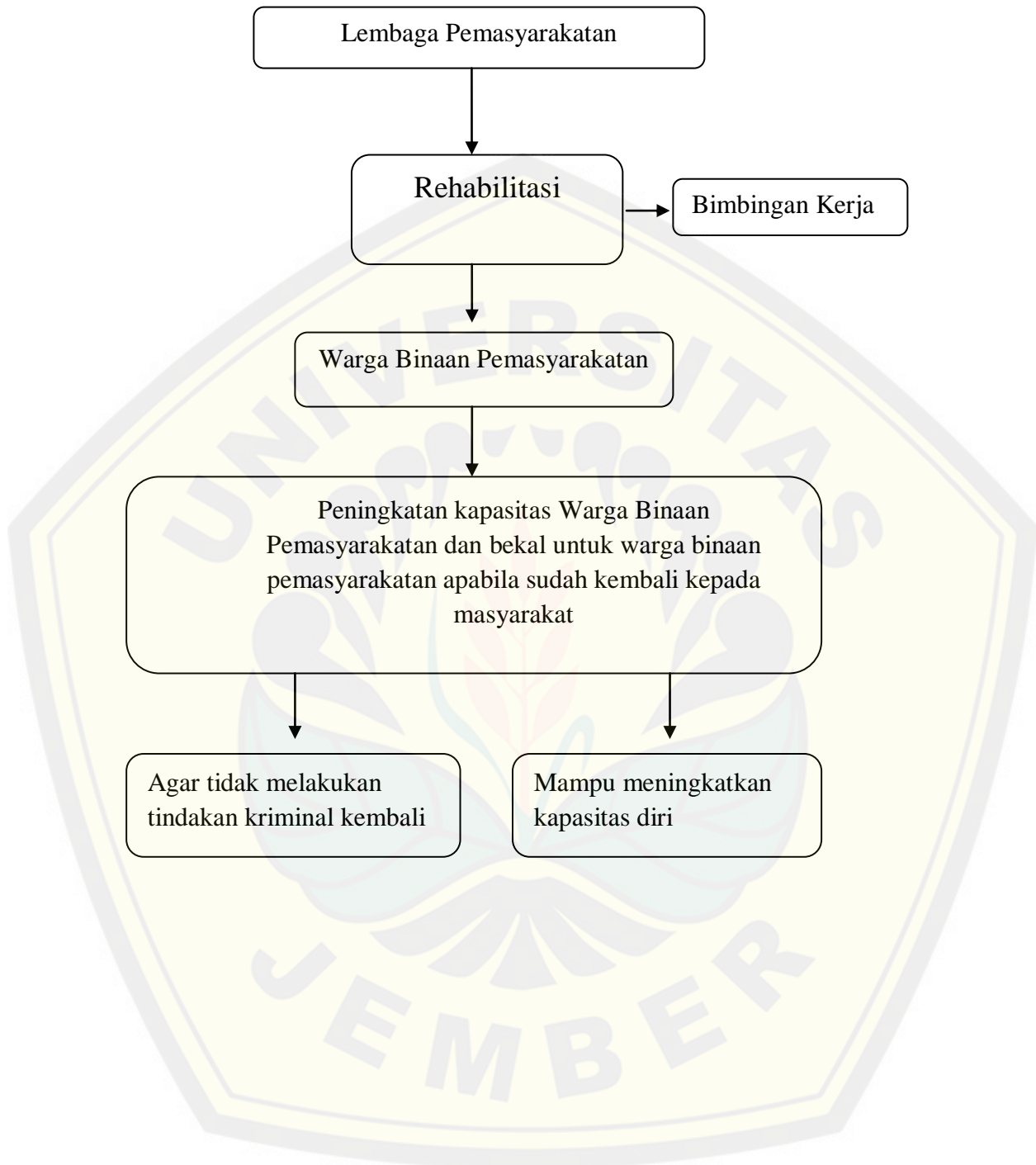
Penelitian ini berawal dengan adanya suatu keadaan dimana seorang melakukan tindakan pidana atau kesalahan yang melanggar peraturan dan norma yang telah dibuat, dengan melakukan tindak pidana tersebut seorang harus mempertanggung jawabkan apa yang sudah ia perbuat dengan menghilangkan sedikit kemerdekaan atau kebebasan yang ia miliki, ia harus berada di dalam jeruji besi dengan vonis yang telah ditentukan oleh hakim

sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, kemudian didalam jeruji besi atau pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan ia mendapatkan pembinaan.

Pembinaan tersebut ada berbagai macam di antaranya ialah bimbingan kerja, dalam bimbingan kerja warga binaan pemasyarakatan di anjurkan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini bimbingan kerja dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan dapat terampil sesuai dengan kemampuan dirinya serta dapat menjadi bekal untuk warga binaan pemasyarakatan pada saat telah kembali kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri serta dapat memberdayakan dirinya sendiri, sehingga ia tidak menjadi pengangguran dan tidak mengulangi tindakan pidana yang mengakibatkan ia harus kembali ke lembaga pemasyarakatan.



Gambar 2.1 alur pikir konsep penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2015:2) yaitu sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah yang dimaksud adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Metode penelitian merupakan salah satu syarat yang akan digunakan saat melakukan penelitian untuk menemukan kebenaran dari fakta ataupun fenomena berdasarkan permasalahan yang di teliti. Metode penelitian akan dijelaskan teknik-teknik yang merupakan proses penelitian dan beberapa hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah difokuskan kepada pendekatan penelitian Deskriptif. Penelitian studi deskriptif merupakan penelitian yang dikaitkan dengan pengumpulan data untuk memberikan konsep atau gejala di lapangan dan dikumpulkan sejeauh dianggap cukup dalam menggambarkan fenomena yang di teliti dan perkembangannya di masyarakat (Sugiyono, 2015).

Menurut Bungin (2007:68) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran kondisi, situasi dan fenomena tertentu.

Tujuan menggunakan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang implementasi program bimbingan kerja terhadap warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan kelas II A Kabupaten Jember, jadi dalam penelitian deskriptif peneliti dapat menjelaskan apa yang dimaksud dalam latar belakang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian memiliki peran penting dalam penelitian ilmiah sebagai pemutusan obyektivitas suatu penelitian, hasil penelitian ilmiah mengandung beberapa unsur dan proses pengumpulan data dilokasi penelitian. Dari latar belakang, rumusan masalah serta

tujuan penelitian dalam “Implementasi Program Bimbingan kerja terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember” maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sugiyono (2015: 3) menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Makna ialah data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak sehingga dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti dapat menemukan jawaban yang benar dan logis yang didasarkan pada data yang empiris dan terpercaya serta untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana implementasi program bimbingan kerja terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember.

3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Sebagai tahapan suatu proses penelitian, langkah awal yang di lakukan sebelum penelitian adalah mentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat untuk mendapatkan data-data, dalam penentuan lokasi juga akan menggambarkan sisi unik lokasi dan juga fenomena yang di anggap layak untuk diteliti, dalam penelitian ini, penentuan lokasi adalah dengan cara *Purposive*, dimana lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian adalah lokasi dimana fenomena yang ada sesuai dengan penelitian yang akan di lakukan.

Adapun lokasi yang sudah ditentukan oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi penelitian karena pembinaan yang dilaksanakan merupakan bimbingan kerja yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember, serta data narapidana atau warga binaan juga diperoleh dari

Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember. Sehingga dengan adanya bimbingan kerja narapidana atau warga binaanpemasarakatan diasah kemampuannya untuk kreatifitas dirinya dan dapat digunakan sebagai pekerjaan sampingan saat telah keluar dari Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember sehingga mantan narapidanadapat mandiri dan diterima kembali dengan baik dimasyarakat serta tidak melakukan kesalahan kembali. Bimbingan kerja di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember merupakan kegiatan yang mempunyai prestasi diantaranya adalah pemecah rekor pembuatan sandal bangkiak terpanjang seIndonesai pada acara 17 agustus tahun 2016, pameran hasil kegiatan kerja yang langsung didatangi oleh Bupati Jember.

3.4 Metode Penentuan Informan

Menurut Moleong (2014:132) informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, jadi harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal. Jadi informan dalam melakukan penelitian merupakan salah satu subyek penting yang sangat dibutuhkan dalam proses penelitian itu sendiri. Karena informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi kondisi secara menyeluruh dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Adapun definisi metode menurut Sugiyono (2015: 53-54):“*Purposive* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”.

Adapun tahap-tahap yang peneliti laksanakan dalam menentukan informan antara lain:

1. Menemui Kasubag Tata Usaha yaitu Drs. Susilo untuk pengarahan penemuan Informan
2. Kemudian masuk keruang pemeriksaan untuk pemeriksaan barang-barang yang dibawa, karena membawa kamera untuk dokumentasi serta wawancara peneliti meminta ijin dibagian penjagaan.

3. Dari penjagaan peneliti langsung keruang kegiatan kerja untuk menemui informan pokok yang sesuai dengan kriteria
4. Untuk informan tambahan peneliti diarahkan oleh kasi kegiatan kerja dan memilih informan tambahan sesuai kebutuhan peneliti
5. Peneliti menggunakan informan pokok sebanyak 3 orang dan informan tambahan sebanyak 4 orang.

Terkait dengan teknik penentuan informan, informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok informan, yaitu informan pokok dan informan tambahan.

1. Informan pokok

Menurut Sugiyono (2015: 57) informan pokok harus memiliki empat kriteria, antara lain:

- a. Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan. Seorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus memiliki pengalaman mengurus atau mengelola program penelitian minimal satu tahun;
- b. Subyek yang masih terlibat secara penuh dan aktif pada kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif di lokasi penelitian menentukan kualitas informan dan kualitas data yang diberikan terhadap peneliti. Maka dari itu, peneliti harus benar-benar memastikan bahwa informan yang akan dipilih aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti;
- c. Subyek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan yang dimintai informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti sehingga diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang efektif dan menghasilkan data yang benar-benar asli di lapangan;
- d. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung di olah atau di kemas terlebih dahulu. Peneliti harus memastikan bahwa informan pokok dapat memberikan keterangan dan informasi yang objektif sesuai dengan realita atau fakta yang ada.

Kriteria informan pokok yang menjadi pedoman peneliti ialah:

1. Pegawai Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember di bagian Bimbingan kerja
2. Pelaksana program bimbingan kerja
3. Pengawas atau pemantau jalannya program bimbingan kerja

Seperti kriteria yang dijelaskan oleh peneliti diatas, maka informan pokok yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah Plh Kasi. Bimbingan kerja, serta dua orang pewartai pembimbing latihan bimbingan kerja yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember karena pegawai tersebut merupakan pelaksana program bimbingan kerja serta pemantau jalannya program bimbingan kerja yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember.

Informan pokok ini berfungsi sebagai sumber untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan untuk penentuan informan pokok, maka profil informan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| ➤ Nama | :Prianggoro Agung W. Amd, Sh, Mh |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Kasi Kegiatan Kerja |
| ➤ Nama | : Mamatrono S.H |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja |
| ➤ Nama | : Eko Hari Santoso |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Staf Lapangan |

2. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan mereka yang tidak terlibat secara langsung, akan tetapi mereka memiliki informasi. Informan tambahan diperlukan untuk mendukung data yang diberikan oleh informan pokok sehingga kriteria dari informan tambahan adalah informan yang dianggap mengerti tentang fenomena dan masih berhubungan dengan informan pokok. Adapun kriteria untuk penentuan informan tambahan yaitu, antara lain :

- Warga binaan pemsarakatan yang telah di vonis hukumannya oleh hakim.
- Warga binaan pemsarakatan yang hukumannya tidak beresiko tinggi (teroris).
- warga binaan pemsarakatan yang mengikuti program bimbingan kerja minimal dua bulan

- dapat memberikan informasi tambahan kepada peneliti karena warga binaan pemasyarakatan tersebut yang melaksanakan program bimbingan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember.

Berdasarkan karakteristik penentuan informan tambahan diatas, maka informan yang masuk dalam karakteristik tersebut adalah dibawah ini:

1. Informan H (hermanto)

Informan H merupakan salah satu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember selama satu setengah tahun dan mengikuti kegiatan Bimbingan Kerja sudah 6 bulan. Informan H berjenis kelamin laki-laki dan dalam kegiatan bimbingan kerja informan H mengikuti kegiatan ketrampilan perkayuan

2. informan I (imam wahyu)

informan I merupakan salah satu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember selama satu setengah tahun dan mengikuti kegiatan Bimbingan Kerja sudah 14 bulan. Informan I berjenis kelamin laki-laki dan dalam kegiatan bimbingan kerja informan I mengikuti kegiatan Tataboga (pembuatan jembem)

3. informan D (danny prasetyo)

informan D merupakan salah satu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember selama satu setengah tahun dan mengikuti kegiatan Bimbingan Kerja sudah 12 bulan. Informan D berjenis kelamin laki-laki dan dalam kegiatan bimbingan kerja informan D mengikuti kegiatan Tataboga (*catering* dan *bakery*)

4. Informan A (anugrah)

informan A merupakan salah satu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember selama dua setengah tahun dan mengikuti kegiatan Bimbingan Kerja sudah 18 bulan. Informan A berjenis kelamin laki-laki dan dalam kegiatan bimbingan kerja informan A mengikuti kegiatan *Barbershop* (potong rambut).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam metode ilmiah, metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data di butuhkan ketika dalam menganalisis penelitian sehingga dapat diketahui kaitan obyek atau permasalahan yang diteliti dapat dijawab dengan dokumen yang telah didapatkan, untuk menganalisis obyek penelitian penelitian dengan baik. Metode pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini menggunakan, antara lain:

3.5.1 Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan secara langsung kepada obyek yang di teliti, artinya metode observasi dijadikan langkah awal untuk mengetahui atau memahami situasi maupun kondisi obyek yang di teliti. Peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui obyek yang diteliti.

Menurut Bungin (2007:119) observasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan obyek pengamatan, dengan demikian pengamat dengan benar menyelami kehidupan obyek pengamatan, dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan mereka.

Penelitian dengan judul “Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan Study Deskriptif Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Jember” teknik pengumpulan data salah satunya menggunakan observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena atau objek yang berkaitan dengan tema penelitian. Berdasarkan tema penelitian maka observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan atau aktivitas yang mengenai rehabilitasi melalui peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan . observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai pemberdayaan yang dilaksanakan dari tahap awal sampai dengan akhir dan observasi kedua mengamati proses berjalannya pemberdayaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan khususnya program bimbingan kerja.

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan secara langsung dan melihat realita dilapangan. Observasi tidak dilakukan secara terjadwal, namun dilakukan setiap saat peneliti melakukan penelitian agar ditemukan data yang valid. Observasi yang dilakukan peneliti tidak semuanya terlibat secara langsung dalam kegiatan bimbingan kerja yang dilaksanakan.

Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hanya berupa buku catatan harian peneliti. Selain catatan harian data yang didapat hanya berupa pandangan atau perseptif peneliti dari hasil melihat fenomena dilapangan yang berkaitan dengan rehabilitasi berupa pemberdayaan warga binaan pemsyarakatan. Data hasil pengamatan atau observasi ini digunakan sebagai pembanding dalam melakukan analisis data dan keabsahan data dengan teknik triangulsai sumber. Data hasil penelitian dikatakan valid jika data yang diperoleh dari ketigateknik pengumpulan data benar dan apabila dibandingkan hasilnya sama. Oleh sebab itu peneliti melakukan teknik pengumpulan data salah satunya observasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi sebagai tahap awal untuk mengetahui kondisi lapangan. Peran peneliti dalam hal ini sebagai partisipan utuh maupun terlibat dalam peran-peran yag beragam. Dalam (Mantra, Ida Bagoes 2004:83) ada dua macam observasi sederhana, yaitu:

1. observasi Nonpartisipatoris

observasi Nonpartisipatoris adalah observasi yang dilakukan apabila orang yang mengadakan observasi tidak ikut mengambil bagian dalam aktivitas masyarakat dan kehidupan orang-orang yang diobservasi.

2. observasi partisipatoris

observasi partisipatoris adalah observasi yang dilakukan apabila orang yang mengadakan observasi turut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang di observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipatoris. Menurut Hendriansyah (2013: 145) observasi non participant adalah peran dalam observasi yang dipilih dimana dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas subjek penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti tidak bisa mengikuti secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan di bimbingan kerja, peneliti hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fenomena dan pada saat-saat

tertentus sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti hanya ikut berkumpul dan mengamati berlangsungnya kegiatan bimbingan kerja yang sedang berjalan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana informan mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Teknik wawancara dilakukan peneliti untuk dapat memberikan keleluasaan informasi. Alasan penggunaan teknik wawancara pada penelitian ini karena pada dasarnya wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara tidak hanya mengetahui informasi mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdaya melainkan mendapatkan segala informasi mendalam mengenai keadaan yang ada di lokasi penelitian, oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian *in-dependen interview* atau wawancara secara mendalam.

Menurut Sugiyono (2015:233) wawancara mendalam terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Wawancara terstruktur

Dalam bentuk wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan dalam bentuk (*guide interview*). Peneliti hanya tinggal membacakan pertanyaan dan subyek penelitian tinggal menjawab yang disediakan sehingga tidak ada jawaban lain selain jawaban yang disediakan.

2. Wawancara semi terstruktur

Dalam bentuk wawancara semi terstruktur, peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan *setting* wawancara. Sehingga tidak ada pertanyaan yang disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan *guideline* wawancara sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

3. Wawancara tidak terstruktur

Dalam bentuk wawancara tidak terstruktur, hampir sama dengan wawancara semi terstruktur, namun wawancara ini memiliki banyak kelonggaran dalam banyak hal pedoman wawancara sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

Dari jenis wawancara diatas, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang mendalam, serta wawancara yang dilakukan peneliti bersifat *fleksibel* menggunakan percakapan sehari-hari agar tercipta keakraban namun tetap terkontrol dan diarahkan dengan *guide interview* yang sudah di buat. Selain itu peneliti menggunakan alat-alat saat melakukan wawancara, antara lain:

1. buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan.
2. Kamera, berfungsi untuk memfoto peneliti saat melakukan wawancara dengan informan serta merekam percakapan peneliti dengan informan, karena dalam Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kabupaten Jember merupakan kawasan bebas *handphone*, semua tamu maupun pegawai tidak boleh menggunakan *handphone* apabila sudah memasuki ruang penjagaan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dapat di artikan sebagai pengumpulan data atau pencarian data pendukung terhadap keperluan penelitian yang berupa surat, catatan harian, laporan, foto dan lain sebagainya. Menurut Moleong (2012:161) Dokumentasi adalah berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada, baik itu data mengenai warga binaan pemsyarakatan, profil lembaga pemsyarakatan, maupun kondisi fisik bangunan lembaga pemsyarakatan. Data yang didapat nantinya dapat digunakan untuk memperkuat data yang didapat dilapangan saat wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen resmi ataupun berupa foto-foto dengan melihat, mencatat, dan sebagainya terkait dengan profil, aktivitas rehabilitasi yang dilaksanakan dalam bentuk program bimbingan kerja untuk warga binaan pemsyarakatan dan sebagainya yang dimiliki oleh Lembaga Pemsyarakatan kelas II A Kabupaten Jember.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang dilakukan setelah metode pengumpulan data. Menurut moleong (2014:145) analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dianalisis yang dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari sampel dan instrumen yang telah dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan, tidak semua data disajikan dalam laporan penelitian tetapi hanya sesuai fokus dan tema penelitian. Oleh karena itu data yang disajikan yaitu data yang sesuai dengan fokus tema yang disajikan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah merujuk terhadap tahapan proses analisis data yang dikemukakan oleh Milles & Huberman dalam Sugiyono (2015: 91) antara lain:

a. Reduksi data

Tahap awal dari teknik analisis data adalah melakukan reduksi data dari data yang sudah diperoleh pada saat pengumpulan data. Sugiyono (2015: 92) mengemukakan bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.”

Jadi, data-data mentah hasil wawancara dicatat secara cermat dan terperinci untuk dipilih dengan cara memilah-milah, disederhaakan dan difokuskan data yang telah di peroleh oleh peneliti, jadi data yang di dapatkan oleh peneliti di pilih yang sesuai dengan obyek yang telah ditentukan oleh peneliti, kemudian disederhanakan dan difokuskan sesuai dengan obyek yang diteliti oleh peneliti.

b. Penyajian data / display data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 95) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Penyajian data terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun kemudian dicari kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Jadi dalam tahap penyajian data, peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah terkumpul kemudian mereduksi data

untuk disajikan dalam bentuk matriks, grafis, bagan dan teks naratif sesuai dengan obyek yang diteliti oleh peneliti.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2015: 99) mengemukakan bahwa “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.”

Pada tahap ini peneliti dituntut untuk benar-benar teliti dalam menyimpulkan hasil penelitiannya agar tidak ada kesalahan dalam menarik kesimpulan atau menafsirkan. Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara menuliskan data dari kategorisasi data yang telah disajikan kemudian mencoba mengaitkan dengan teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu metode yang sangat penting, karena setiap informasi yang diterima peneliti mempunyai arti dan hal tersebut harus di saring atau dipilah-pilah sesuai dengan fokus penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk memperoleh temuan dari interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.

Menurut Denzim dalam Moleong (2014: 124) triangulasi dibedakan menjadi tiga yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan, antara lain:

a. Triangulasi sumber

Membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan informan yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi metode

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Jadi dalam triangulasi metode peneliti melakukan pengecekan apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di interview.

c. Triangulasi teori

Analisis telah menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk memperjelas perbandingan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai teknik keabsahan data. Proses triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengecek kembali data yang telah diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Langkah yang dilakukan yaitu mengkompilasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini membandingkan data dari sumber satu dengan sumber yang lain yaitu informan pokok dan informan tambahan. Sedangkan untuk triangulasi metode peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik pengungkapan data kepada sumber data. Peneliti melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan metode atau teknik yang sama dan pengecekan dengan metode atau teknik yang berbeda. Proses triangulasi dilakukan pada tahap reduksi dan penarikan kesimpulan untuk memastikan data yang dihasilkan sudah valid.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa bimbingan kerja merupakan salah satu kegiatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember. Berjalannya program bimbingan kerja memiliki tahapan-tahapan, tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan berisi tentang persiapan yang dilaksanakan sebelum program bimbingan kerja dimulai, diantaranya yaitu: pemeriksaan anggaran yang disediakan oleh kantor untuk pelaksanaan program bimbingan kerja, yang kedua menyiapkan program yang akan dibuat sesuai dengan minat dan bakat para warga binaan yang akan mengikuti agar tidak ada unsur pemaksaan, yang ketiga apabila sudah ada keputusan maka dibuatlah proposal untuk dilaksanakannya program bimbingan tersebut, kemudian yang keempat mendata warga binaan pemsarakatan yang akan mengikuti program bimbingan kerja, tidak semua dapat mengikuti program bimbingan kerja karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program bimbingan kerja petugas bagian bimbingan kerja memantau jalannya program bimbingan kerja karena ada pihak ketiga yang melatih program bimbingan kerja, pelatih merupakan orang yang sudah ahli dalam bidangnya sehingga warga binaan pemsarakatan dapat menyerap ilmu secara maksimal, pelaksanaan pelatihan program bimbingan kerja sudah disiapkan dari sarana dan prasarananya oleh petugas dan tidak ada unsur keterpaksaan warga binaan pemsarakatan untuk mengikuti program bimbingan kerja karena program tersebut diambil dari kegiatan mereka diluar, serta apabila ada warga binaan yang ingin mengikuti program bimbingan kerja tetapi tidak memiliki keahlian maka akan diarahkan ke program bimbingan kerja yang disukai. Waktu pelaksanaan program bimbingan kerja dilaksanakan pada jam dinas *pegawaifull*, apabila ada pekerjaan yang waktu penyelesaiannya harus selesai besok tetapi belum selesai maka diperbolehkan untuk lembur dengan pengawasan oleh petugas bimbingan kerja.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana program ini mencapai sasaran sesuai dengan rencana program. Menurut Adi (2005:179) evaluasi adalah sebagai proses pengawasan dari petugas terhadap program yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan pada keseluruhan proses pelaksanaan program bimbingan kerja mulai pra-pelatihan (*input*), pelaksanaan pelatihan (*process*), dan paska pelatihan (*output, outcome, benefit, dan impact*). Evaluasi program bimbingan kerja dilakukan dua minggu sekali. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang mencakup jangka panjang dan jangka pendek dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data berupa informasi tanggapan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja sebagai bahan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan program bimbingan kerja, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari setiap program.

Bimbingan kerja adalah kegiatan-kegiatan kerja atau pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh para warga binaan pemasyarakatan yang berguna untuk bekal warga binaan pemasyarakatan, agar pada saat telah dinyatakan bebas warga binaan pemasyarakatan tersebut memiliki keahlian bekerja dan tidak mengulangi perbuatan menyimpang serta warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak bosan karena tidak ada pekerjaan dan menunggu hukuman yang dijalani selesai.

Program bimbingan kerja terbagi dalam 10 *item* pekerjaan, antara lain:

1. *Laundry*
2. Tataboga (penjualan jemblem) dan Tataboga (*catering dan bakery*)
3. *Barbershop*
4. Perikanan
5. Pengelasan
6. Kerajinan-kerajinan dari kardus bekas
7. Pertukangan
8. Perkayuan
9. Pembuatan paving blok

10. Kerajinan bunga akrilik

Adapun faktor pendorong dan penghambat dilaksanakannya program bimbingan kerja antara lain:

a. Faktor pendorong

1. Untuk warga binaan pemasyarakatan mengurangi kejenuhan
2. Untuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat berfikir positif serta dapat berkreasi
3. Untuk warga binaan pemasyarakatan agar terampil dalam berkerja guna sebagai bekal apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
4. Pemberian premi untuk warga binaan pemasyarakatan agar lebih semangat
5. Dibantu dengan dana anggaran kantor untuk dapat berkreasi

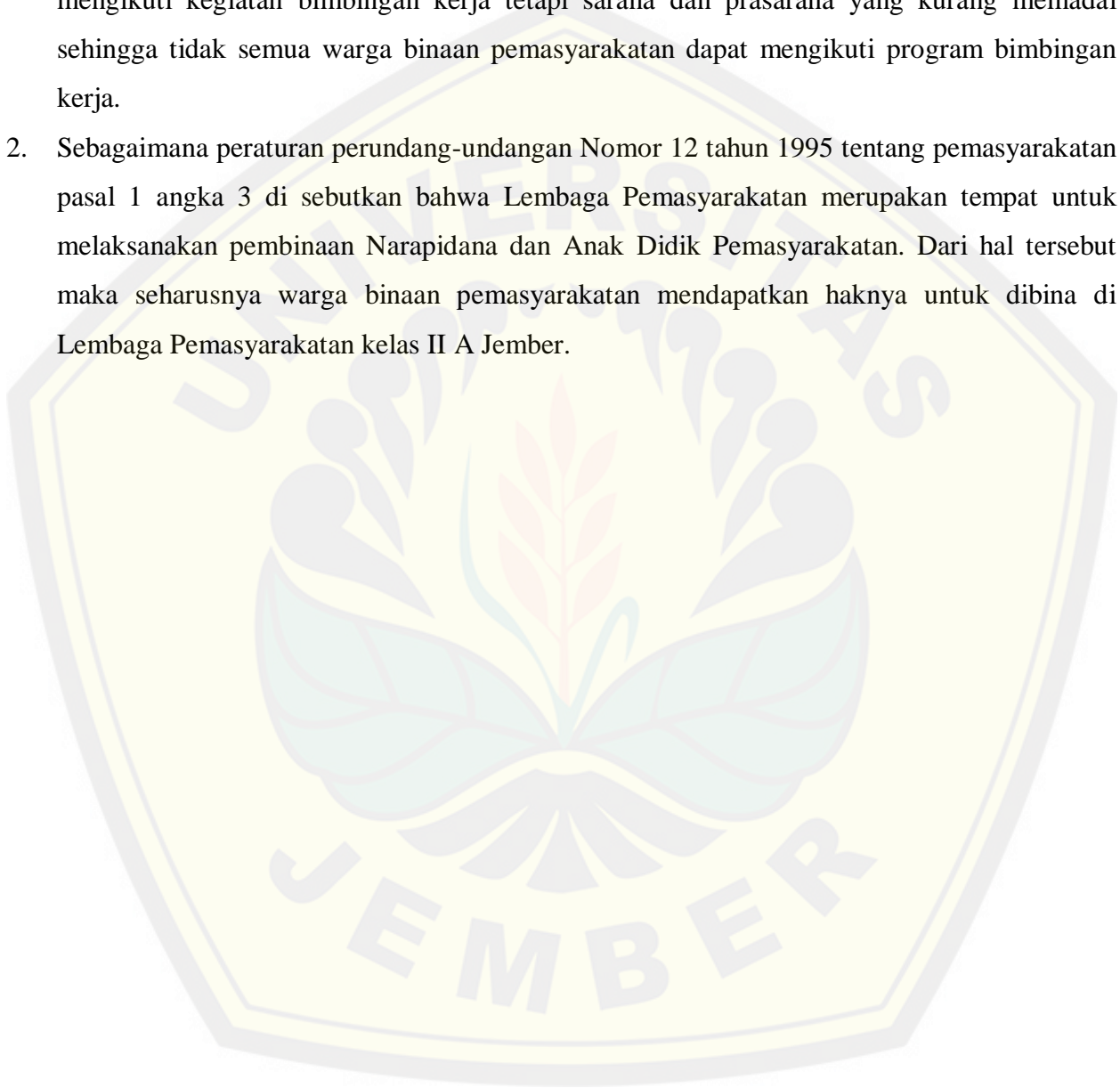
b. Faktor penghambat

1. Warga binaan pemasyarakatan malas untuk berkreasi
2. Warga binaan pemasyarakatan malas untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan kerja
4. Dana anggaran dari kantor sangat minimal

5.2 Saran

Adapun saran yang diperoleh dari hasil analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya lembaga pemasyarakatan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk program bimbingan kerja karena warga binaan pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja tetapi sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat mengikuti program bimbingan kerja.
2. Sebagaimana peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 3 di sebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dari hal tersebut maka seharusnya warga binaan pemasyarakatan mendapatkan haknya untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achlis. 2011. *Praktek Pekerja Sosial*. Bandung: STKS
- Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Adi, Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Hamzah, Andi, 1985. *System Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Istian Hermawati. 2001. *Metode Dan Teknik Dalam Praktik Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Ife, Jim. 1996. *Pembangunan Masyarakat: Analisis dan Praktik*, diterjemahkan oleh Taufik Rohman. Jakarta: CFMS
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bumi Putera
- Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Jember
- Midgley. 2005. *Pembangunan Sosial dalam Perspektif Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Diperta Islam Departemen Agama RI
- Moleong, J. L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rodakarya
- Nassarudin, E. H. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Poerwadarminta, W, J, S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Priyanto, Dwija. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Parsons, PW. 2008. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet

- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Sunyoto & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Tukiran, Hidayat. 2011. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Bandung: CV Alfabeta
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Public Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang: Bayu media publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pessindo

SKRIPSI:

- Wijaya, Anieko. 2005. *Indikasi Peredaran Narkoba di LP Madiun*. Universitas Jember: FISIP
- Ibrahim, Anwar. 2005. *Kondisi Sosial Ekonomi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember*. Universitas Jember: FISIP
- Rusita, Dian. 2013. *Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso*. Universitas Jember: FISIP
- Indah, Nur. 2014. *upaya tahanan pendamping (tamping) membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan*. Universitas Jember: Fisip
- Hikmah, Asrotul. 2015. *Implementasi Program Life Skill di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Annibros*. Universitas Jember :FISIP
- La Siwe, Laila W. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Wonoasri Melalui Pembentukan Kube Batik Warna Alam*. Universitas Jember: FISIP

Undang-undang:

- Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.03.2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Internet:

<http://repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf> (di akses 26 September 2017)

http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/b1_indikator_kesejahteraan_bukui_kemiskinan_webs-1.pdf (di akses pada 30 November 2017)

<http://www.bps.go.id> (di akses pada 12 Februari 2018)

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/2079/1726>(di akses pada hari selasa 13 agustus 2019 pukul 10:47)

www.kpsrb.bappenas.go.id (di akses pada 27 Oktober 2019 pukul 13:27)



LAMPIRAN**LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA****PEDOMAN WAWANCARA****Guide interview****WAWANCARA INFORMAN POKOK**

Identitas :

- Nama :
- Jabatan :

Untuk informan pokok :

1. Apakah ada kriteria khusus untuk narapidana mengikuti bimbingan kerja?
2. Bagaimana persiapan program bimbingan kerja dijalankan?
3. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan kerja?
4. Apa saja kendala dari pelaksanaan program bimbingan kerja?
5. Bagaimana proses evaluasi program bimbingan kerja
 - Apa tujuan diadakannya evaluasi program bimbingan kerja
 - Siapa saja yang turut melaksanakan program evaluasi
6. Apa saja faktor pendorong berjalannya program bimbingan kerja?
7. Apa saja faktor penghambat berjalannya program bimbingan kerja?

PEDOMAN WAWANCARA

Guide interview

WAWANCARA INFORMAN TAMBAHAN

Identitas :

- Nama :
- Tindak pidana :
- Lama mengikuti bimbingan kerja :

Untuk informan tambahan:

1. Sudah berapa lama anda masuk di LP?
2. Sudah berapa lama anda mengikuti program bimbingan kerja?
3. Selama mengikuti bimbingan kerja, apakah anda mengetahui bimbingan kerja itu apa?
4. Banyak program lain yang ada di LP, mengapa memilih untuk ikut bimbingan kerja?
5. Apakah ada kriteria khusus untuk mengikuti bimbingan kerja?
6. Perbedaan apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan kerja dan sebelum mengikuti bimbingan kerja?

LAMPIRAN B**TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN POKOK**

1. Eko hari santoso selaku staf bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja

Saya: pak mohon maaf ya saya mengganggu waktu kerjanya bapak

E: iya mbak sudah sebagian dari kewajiban saya membantu anak-anak kuliah yang kesini mbak

Saya: terimakasih bapak, saya langsung saja untuk bertanya-tanya ya pak?

E: silahkan mbak

Saya: jadi gini pak, saya kemarin kan Tanya-tanya ke warga binaan yang ada di bimker, ada kriteria khusus gak untuk mengikuti bimbingan kerja, nah jawabannya gak ada, menurut bapak bagaimana?

E: memang gak ada kriteria khusus ya jadi semua itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan, terserah warga binaannya mau mengikuti apa, kan banyak kegiatan yang ada disini mbak (Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Jember)

Saya: minimal untuk hukuman berapa bulan pak?

E: semua wajib mengikuti kegiatan kerja

Saya: untuk persiapan menjalankan program kegiatan kerja sendiri bagaimana pak?

E: jadi kita itu mengambil dari kegiatan mereka waktu diluar, jadi untuk yang sudah memiliki kegiatan diluar misalnya ngelas ya diikutkan ke ngelas, bisa pertukangan ya dimasukan ke pertukangan, terus untuk mereka yang tidak memiliki keahlian khusus diluar kita tawarkan untuk mengikuti kegiatan yang apa. Misalnya pak saya pingin bisa ngelas, ya kita arahkan kesana kalau yang pertukangan ya kita arahkan ke pertukangan, jadi kita tawarkan ke mereka dan disini tidak ada unsur memaksa, kalau dipaksakan hasilnya tidak akan bisa maksimal.

Saya: oh jadi di sesuaikan gitu pak ya?

E: iya mbak

Saya: untuk tahapannya sendiri bagaimana pak?

E; maksudnya mbak?

Saya: gini pak, setiap kegiatan kan ada tahapan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, nah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk adanya kegiatan tersebut itu apa saja?

E: oo sebelum mereka kita terjunkan ke lapangan?

Saya: iya pak

E: ya kita data dulu mbak, alamatnya, namanya, pidananya kita data dulu

Saya: kalau sudah mengikuti itu harus terus ya pak?

E: iya

Saya: ada absensi pak?

E: ada

Saya: untuk pelaksanaan programnya sendiri bagaimana pak?

E: maksudnya gimana mbak?

Saya: gini pak apakah programnya dapat berjalan dengan lancar atau ada hambatan?

E: programnya ya sampai mereka bisa dan mahir

Saya: apakah ada kendala pak?

E: kendalanya kita itu bahan untuk pelatihan kerja mereka

Saya: bahannya kan dari luar pak?

E: bahan-bahan pokok yang untuk pelatihan itu lho, kita kan kendalanya disitu. Misalnya mereka mengikuti pelatihan kerja ngelas ya, terus bahan seperti besinya dll itu kita yang kesulitan dan bahan produksi mereka kita juga kesulitan untuk memasarkan, jadi bisa bikin kita gak bisa jual

Saya: tapi selama ini gimana pak?

E: selama ini kita nunggu pesanan dulu, jadi kalau ada orang pesan baru kita bikinkan, seperti kita buat kayak gini (kerajinan tangan) kita tidak bisa jual kalau gak ada orang pesen, kalau ada orang pesen baru kita bikin

Saya: untuk cara pemesanannya gimana pak? Kan yang beli orang luar?

E: ya langsung lewat bimker

Saya: pernah diadakan evaluasi tentang program pelatihan yang ada dibimker pak?

E: belum pernah

Saya: apakah ada program yang harus di buang karena tidak efektif pak?

E: gak ada mbak

Saya: faktor pendorong kegiatan pelatihan apa pak?

E: untuk warga binaan mengurangi kejenuhan mbak, kan menunggu hukuman pasti jenuh mbak

Saya: iya pak..hehe, apakah ada faktor penghambat pak?

E: gak ada mbak, lancar-lancar aja

Saya: Alhamdulillah ya pak hehe, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata pak

E: iya sama-sama mbak

2. Mamatrono sebagai Kasubsi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja

Saya: mohon maaf saya mengganggu waktu kerjanya bapak

M: iya tidak apa-apa mbak, ada yang bisa saya bantu mbak?

Saya: iya pak saya mau tanya-tanya mengenai bimker

M: monggo mbak

Saya: apakah untuk mengikuti bimbingan kerja warga binaan ada kriteria khusus pak?

M: iya ada kriteria khususnya mbak yaitu semua warga binaan yang baru jatuh dari tahanan, kami kumpulkan semua kemudian ditanya keahliannya masing-masing di apa, nanti kalau sudah ketemu diarahkan ke keahliannya masing-masing

Saya: kemudian untuk persiapan program bimbingan kerja sendiri bagaimana pak?

M: untuk persiapan program bimbingan kerja yang jelas kami sudah sangat siap, dari tempat, sarana dan prasarana sudah siap, tinggal ya itu kita membagikan narapidana ke keahliannya masing-masing. Seandainya tidak punya keahlian kami arahkan untuk mengikuti kegiatan yang mereka sukai

Saya: untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan kerja sendiri bagaimana pak?

M: pelaksanaan program bimbingan kerja ya pas jam dinas *full*, kalau pas ada pesanan lebih bisa-bisa malah lembur mbak

Saya: sampai malam pak? Kan katanya sehabis sholat magrib harus masuk sel?

M: iya tapi kalau memang itu mendadak, seperti kemarin persiapan jfc itu sampai jam 12 malam mbak, gak apa-apa kan kita awasi secara benar mbak.

Saya: untuk kendala kegiatan bimbingan kerja sendiri ada pak?

M: ada mbak, kendalanya ya dari narapidananya sendiri, kadang-kadang kan mereka juga males untuk berkreasi males untuk berkeahlian jadi masih dijemput masih dipanggil-panggil

Saya: harus dijemput ya pak?

M: iya kalau dipanggil gak datang ya kita jemput

Saya: apa tidak ada hukuman untuk narapidana yang tidak datang dalam kegiatan bimbingan kerja pak? Kan ada absensi pak?

M: nah kalau masalah itu nanti berkaitan dengan CB dan PB mereka karena salah satu persyaratan untuk mengajukan CB dan PB mereka itu surat rekomendasi dari kegiatan kerja

Saya: lihat aktif atau tidaknya narapidana mengikuti kegiatan bimbingan kerja pak?

M: iya lihat aktifnya, kalau gak aktif kan berarti mereka juga belum memenuhi persyaratan peringanan hukuman

Saya: apakah ada evaluasi untuk kegiatan bimbingan kerja pak?

M: iya ada mbak, kita dua minggu sekali evaluasi kegiatan bimbingan kerja yang ada disini (Lembaga Pemasarakatan klas IIA Jember)

Saya: yang mengikuti evaluasi siapa saja pak?

M: semua ikut mbak, termasuk napi yang mengikuti kegiatan kerja

Saya: dari evaluasi tersebut apakah ada kegiatan yang harus dihapus pak?

M: Alhamdulillah gak ada mbak, lancar semua kegiatannya

M: disini tempatnya berkreasi mbak

Saya: hehe iya pak, ada faktor pendorong di adakannya kegiatan bimbingan kerja pak?

M: untuk faktor pendorong ya yang jelas kami ingin memberi kebebasan, maksudnya kalau orang-orang bikin kerajinan ketrampilan ini ya bisa dijual sendiri, didepan itu seandainya kerja dibelakang kami kasih premi mereka biar mereka juga semangat

Saya: oh gitu pak, bukannya narapidana gak boleh pegang uang ya pak?

M: memang gak boleh,kan dititipkan nanti kalau mau beli-beli kan tinggal ambil, penitipannya ada di register itu, jadi kalau mereka mau belanja kan tinggal ambil sesuai dengan apa yang mau di belanjakan, tidak semuanya. Misalnya mau beli rokok ya ambil seharga rokok

Saya: oh gitu ya pak, untuk faktor penghambatnya sendiri pak?

M: gak ada penghambatnya mbak, kendalanya ya cuma yang itu tadi, narapidanya yang males, kalau mereka bener-bener gak mau mengikut kegiatan ya kita tinggal tidak kasih surat rekomendasi untuk mengurus CB dan PB walaupun remisi juga gak bakalan dapat

Saya: ya kan harus ada motivasi pak biar narapidanya gak malas buat mengikuti kegiatan kerja

M: ya makanya itu meraka yang mengikuti kegiatan kami pertama kasih premi, yang kedua Negara juga pasti kasih keringanan hukuman tapi kalau mereka gak mau ya sudah Negara juga gak mau, kami selaku pelaksana di Negara itu juga akan melaksanakan tugas itu

Saya: iya pak, pertanyaannya sudah habis pak, saya sangat berterimakasih bapak meluangkan waktu kerjanya untuk menjawab pertanyaan dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah kata ya pak

M: iya mbak sama-sama

3. Prianggoro agung wibowo sebagai Kasi bimbingan kerja

Saya: mohon maaf pak saya mengganggu waktu kerjanya bapak

P: iya tidak apa-apa mbak, ada yang bisa saya bantu mbak?

Saya: iya pak saya mau tanya-tanya mengenai bimker

P: oh iya mbak silahkan, jangan resmi-resmi ya mbak

Saya: hehe iya pak

P: fakultas apa mbak?

Saya: Fisip pak

P: jurusan?

Saya: kesejahteraan sosial pak

P: oh KS mbak

Saya: bapak tau?

P: ya tau mbak, saya dulu juga kuliah di unej tapi di fakultas hukum mbak, lulus tahun 2003

Saya: oh iya pak, saya langsung ke pertanyaan pertama ya pak?

P: oh iya mbak silahkan

Saya: apakah ada kriteria khusus untuk narapidana mengikuti bimbingan kerja?

P: ada, yang pertama niat atau keinginan bekerja kalau gak ada niat kita paksa-paksa seperti apapun ya gak bisa, pertama aja ikut kemudian lama kelamaan hilang gak mau datang lagi, kan percuma. Jadi yang pertama niat, niat untuk bekerja dia ada.

Saya: selanjutnya pak?

P: lalu yang kedua mempunyai keahlian

Saya: kalau gak punya keahlian bagaimana pak?

P: kita latih, yang penting ada niat untuk bekerja, contohnya seperti ini (seorang narapidana yang membuat kerajinan tangan) awalnya dia tidak punya keahlian tapi karena dia mempunyai niat untuk mengisi waktu dari pada harus nganggur-nganggur dia lihat temennya bikin kayak gitu akhirnya dia belajar dan akhirnya bisa

Saya: iya pak, saya lanjut pertanyaan yang kedua ya pak?

P: iya mbak

Saya: Bagaimana persiapan program bimbingan kerja dijalankan?

P: yang pertama kita memang disini kan sudah ada beberapa *item* pekerjaan yang sudah ada, terus kita tambah lagi dengan beberapa *item* pekerjaan lagi. Pertama kali saya datang disini yang ada cuma *laundry*, terus *tataboga* tapi waktu itu *tataboga* hanya penjualan *jemblem*, dan *babersop* mbak, hanya ada tiga *item* pekerjaan, begitu saya datang saya tambah *item* perikanan, pengelasan, *tataboga* yang warung itu sama saya tambah *bakery*, kerajinan-kerajinan dari kardus bekas, terus pertukangan, perkayuan itu juga saya hidupkan lagi, terus itu kemarin yang sempat *vacum* pembuatan pavingblok dan saya hidupkan kembali. Alhamdulillah sekarang semua berjalan dengan lancar, sudah ada 9 *item*. Dan saya ini lagi mempersiapkan untuk pelatihan pembuatan *tempe*, kita masih menyusun proposalnya. Kalau untuk pembiayaan berdasarkan dari dana anggaran kantor, dana untuk pelatihan itu sudah ada. Eh ada 10 *item* mbak, kerajinan bunga akrilik yang banyak dikerjakan di blok wanita tapi disini juga ada yang bisa mbak. Blok wanita juga saya karyakan mbak

Saya: oh iya pak, di blok wanita sendiri kegiatannya apa saja pak?

P: kalau di blok wanita sendiri ada beberapa *item* seperti pembuatan bunga akrilik ini Cuma sementara vacuum karena kemarin yang saya pekerjakan di kirim ke lapas wanita semua, terus ada bikin pita kecil-kecil itu juga sudah saya bikinkan tapi sementara vacuum karena kemarin blok wanita ada sekitar 9 atau 10 orang kita pindah di lapas wanita akhirnya saya kehilangan banyak pekerja yang sudah bisa, jadi sekarang mau saya rintis untuk melatih yang baru-baru lagi.

Saya: oh iya-iya pak, saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya pak?

P: oh iya mbak

Saya: Apa saja tahapan persiapan program bimbingan kerja?

P: nah kalau tahapannya ini kan pertama kita lihat dari anggaran, yang kedua kita siapkan programnya apa, lalu kita siapkan proposalnya, terus kita siapkan WBPnya (warga binaan masyarakat) yang mau di pekerjakan berapa untuk pelatihan atau mengikuti program itu. Semua kita batasi, tidak semua dapat mengikuti program karena disini kan tempatnya juga sempit, tempatnya terbatas jadi kita batasi dan mereka kita batasi yang benar-benar mau bekerja dari pada harus bengong di kamar dan mikir yang negative.

P: oh iya mbak saya ada satu item lagi yang ketinggalan, kerajinan bunga dari wadah rokok, tapi contohnya sudah hilang ini dimeja saya, mungkin sudah laku kali ya..hehe

Saya: ohh iya pak saya tau, dulu pernah magang disini dikasih kenang-kenangan bunga seperti itu, vasnya terbuat dari bungkus rokok

P: iya tepat sekali mbak, semua itu masuk dalam kategori kerajinan mbak, Alhamdulillah program yang saya jalankan semua berlanjut sampai sekarang jadi setelah pelatihan berjalan terus tidak terputus

P: langsung lanjut pertanyaan berikutnya kalau ada mbak

Saya: oh iya pak, Bagaimana pelaksanaan program bimbingan kerja?

P: nah kalau untuk pelaksanaan program itu yang pertama kalau misalnya itu pelatihan, awalnya itu dari pelatihan terus baru dijadikan program tetap, itu kita bisa mendatangkan instruktur dari luar, instrukturnya itu kita mendatangkan dari orang-orang yang berkompeten atau ahli. Jadi

misalnya kita mau bikin pelatihan pembuatan tempe, kita datangkan pengusaha tempe, jadi memang dia sudah memiliki bidang usaha tempe nanti kita undang untuk memberikan pelatihan dari awal sampai akhir seperti apa.

Saya: iya pak, kemudian apa saja kendala dari pelaksanaan program bimbingan kerja pak?

P: kalau kendala sih, pertama biasanya kita kalau untuk program yaitu dananya minim karena anggaran kantor jadi kita sebisa mungkin dengan anggaran minim tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, sama seperti jfc kemarin itu kita menggunakan dana yang minim tapi dengan hasil yang wow, lumayan bikin heboh. Ibu bupati saja sampai terkagum-kagum karena ternyata kita dari lapas jember ikut berpartisipasi. Yang kedua biasanya dari anak-anaknya sendiri, biasanya nanti ada yang ditengah jalan gitu sudah tidak mau ikut lagi dengan berbagai macam alasan, biasanya karena alasan psikisnya terpengaruh dari keluarga misalnya istrinya minta cerai dan mungkin ada masalah keluarga yang lain kita tidak tau, nah itu biasanya terputus ditengah jalan. Biasanya sih kalau kita untuk tenaga ahli atau yang berkompeten insyaallah kita rekan banyak cuma ya gitu kadang-kadang mereka terkendala diwaktu jadi kita menyesuaikan. Jadi kita kendalanya cuma itu saja.

Saya: saya langsung ke pertanyaan berikutnya pak, Bagaimana proses evaluasi program bimbingan kerja?

P: kalau tujuannya kita melakukan evaluasi itu ya memang untuk perbaikan jadi misalnya kita melakukan program pelatihan kok ternyata program pelatihan tersebut ada kekurangan disini baru kami evaluasi. Jadi nanti kedepannya ataupun nanti untuk tahap berikutnya agar dapat berjalan terus kita melakukan perbaikan jadi tau kekurangannya disini dan untuk evaluasi kita rutin dalam 2 minggu sekali. Jadi kita lihat perkembangan dari tiap item pekerjaan apakah ada kekurangannya atau tidak, misalnya kekurangan bahan jadi kita langsung bisa melakukan pemenuhan kekurangan tersebut.

Saya: oh gitu pak, siapa saja yang turut melaksanakan program evaluasi pak?

P: semua mengikuti evaluasi, jadi memang setiap staf saya disini saya bebaskan pekerjaan itu dan mereka masing-masing sudah memenuhi tanggung jawab. Jadi seperti bu gustri itu dia mengurus kerajinan, nah dari mereka itu saya serahkan tanggung jawab untuk mengawasi dan

mengevaluasi, jadi kalau dalam 2 minggu saya panggil untuk laporan apa saja yang kurang dalam tiap item kerja dan bagaimana hasilnya, nah mereka laporannya itu ke saya kalau tidak langsung ke pak mamat, pak mamat itu kasubsinya bimbingan kerja dan pak mamat laporan ke saya tapi kadang-kadang dari staf laporan langsung ke saya juga tidak apa-apa.

Saya: oh iya pak, untuk evaluasi kan sudah terjawab saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya pak?

P: iya silahkan mbak

Saya: apakah selama ini ada program kerja yang dihapus karena banyak kekurangan atau evaluasi pak?

P: Alhamdulillah sampai sekarang belum ada mbak, dan saya berharap tidak ada yang dihapus mbak, selama ini programnya lancar-lancar saja, adapun kendala Alhamdulillah dapat diatasi mbak. Makin banyak item pekerjaan makin bagus.

Saya: Alhamdulillah ya pak..hehe untuk faktor pendorong diadakannya program bimbingan kerja apa pak?

P: kalau faktor pendorong yang pertama itu kan dari WBPnya sendiri yang mau untuk bekerja, dan yang kedua kami didukung oleh anggaran walaupun minim terus yang ketiga kita rutinitas *continuenya* itu berjalan terus karena memang anak-anak ini yang sudah bisa suatu saat mereka bebas tapi kita sudah ada regenerasi, yang keempat ini karena anak-anak ini mendapatkan premi, premi itu istilahnya mereka mendapat bayaran dari hasil kerja mereka jadi dari setiap item pekerjaan disini Alhamdulillah menghasilkan semua, nah dari keuntungan yang kita dapat itu pasti kita bagi dua, yang pertama untuk PNBP jadi PNBP yang disetorkan di Negara dan yang kedua kami serahkan untuk premi anak-anak. Disini premi ada dua macam yaitu bentuk barang contohnya makan minum kami yang tanggung dan bentuk uang tapi di berikan waktu sudah keluar

Saya: oh iya pak, untuk faktor penghambatnya sendiri bagaimana pak?

P: faktor penghambat paling utama itu adalah minimnya anggaran, kalau anggarannya banyak saya bisa bikin banyak program..hehe, yang kedua terbatasnya peralatan yang mendukung,

karena kalau saya bilang kita terhambat karena tenaga itu gak mungkin karena dari 850 masak tidak ada yang bisa, lalu untuk yang ketiga lokasi, kalau kita dikasih lokasi yang lebih luas pasti bisa leluasa lah.

Saya: katanya mau pindah lokasi pak?

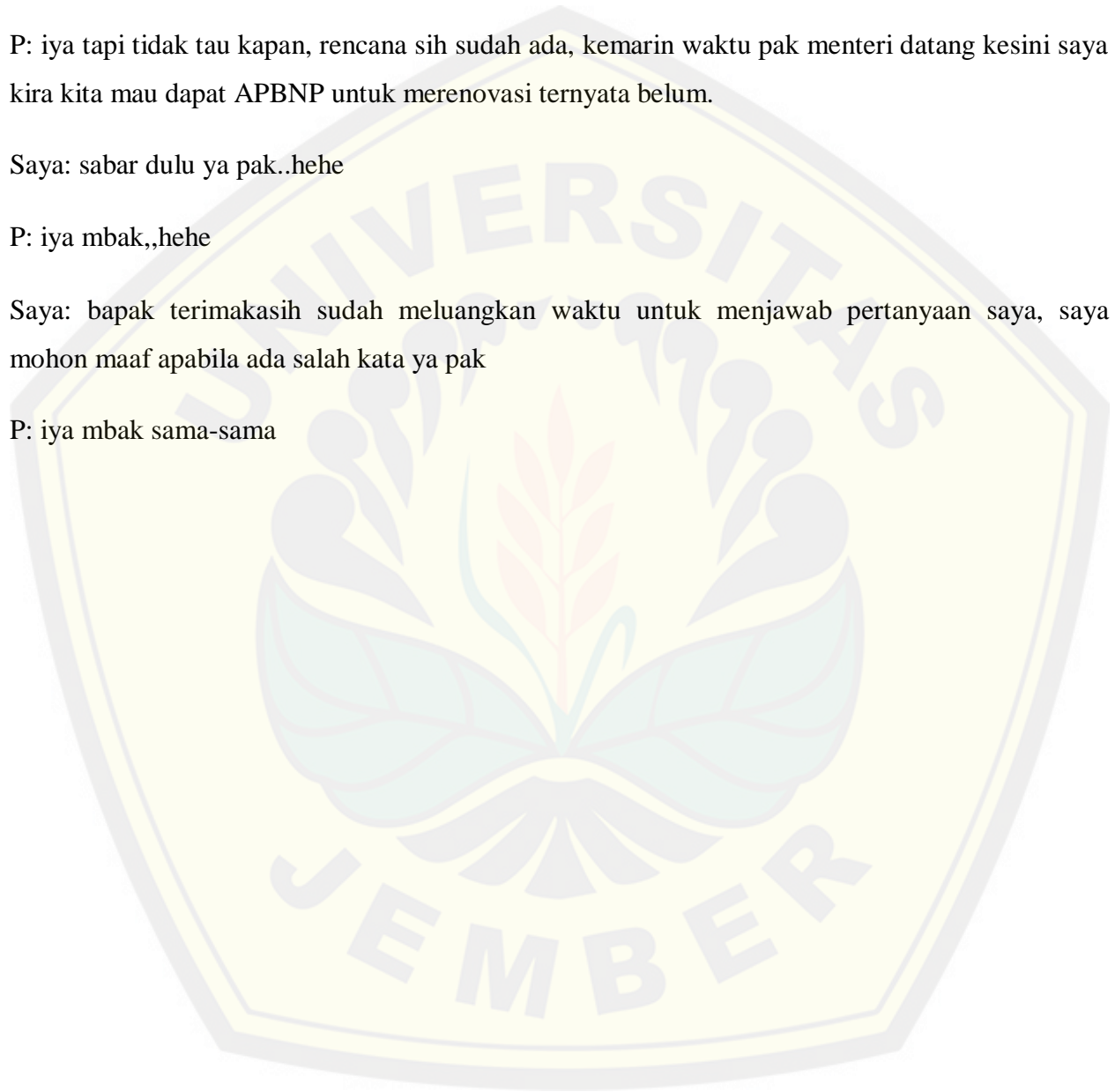
P: iya tapi tidak tau kapan, rencana sih sudah ada, kemarin waktu pak menteri datang kesini saya kira kita mau dapat APBNP untuk merenovasi ternyata belum.

Saya: sabar dulu ya pak..hehe

P: iya mbak,,hehe

Saya: bapak terimakasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya, saya mohon maaf apabila ada salah kata ya pak

P: iya mbak sama-sama



LAMPIRAN C**TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN TAMBAHAN**

1. Hermanto: pasal 285 berada di lapas selama satu setengah tahun, mengikuti bimker selama 6 bulan, rumah mayang

Wawancara:

Saya: samean sudah berapa lama masuk di lapas mas?

H: setahun setengah mbak

Saya: wes sui a melu bimker?

H: yo lumayan mbak

Saya: wes pirang ulan atau tahun mas?

H: wes 6 ulan mbak

Saya: sebelum sepurane yo mas ganggu waktune samean, aku arep takon-takon gak popo tho?

H: iyo gak popo mbak

Saya: menurut samean bimker iku gimana se mas?

H: hmm..gimana ya..ramah lingkungan, gak pernah anu ya, buat sehari-hari, gimana ya mbak...bisa buat mengisi hari-hari yang kosong, disini buat ketrampilan, buat apa aja yang gak tau bisa jadi tau mbak, bisa buat jadi pengalaman lah.

Saya : samean dsini bisa bikin apa?

H: ya sembarang mbak, sudah bisa semuanya

Saya: yang gk bisa dulu di ajarin?

H: ya iya, pertamanya ya gak bisa mbak, terus di ajarin pas bisa, kalau sekarang saya kerjanya cuma ngeloundry dsini.

Saya: kenapa kok gk ikut program yang lain mas? Kenapa kok bimker?

H: ya gimana ya mbak, wong enak disini kok, temen-temennya enak juga, ramah.

Saya: dulu awal ikut bimker itu tahapannya gimana mas?

H: awalnya saya disini ikut ngelas mbak, habis itu berhenti, gak enak itu mbak ngelas mbak, habis itu di ajak sama temenku, diajak di loundryan ini ya sampek sekarang ini wes mbak

Saya: berarti ikut bimker itu gak ada tahapan-tahapan yang harus gimana gitu ya mas?

H: gak ada syaratnya mbak, yang penting disini itu gak nakal, kapan disuruh petugas harus mau, manut gitu mbak

Saya: manfaatnya ikut bimker apa mas?

H: manfaatnya disini ya buat kesehatan bisa karena sehari-hari ada kegiatan mbak, gak makan tidur aja, dsini kan ada alat-alat buat latihan olahraga gitu mbak, bikin sendiri

Saya: oh iya-iya mas, terimakasih mas, maaf lo mengganggu waktunya samean

H: iya sama-sama mbak

2. Imam wahyu : pengguna sabu, dilapas sudah 1,5 tahun dan sudah mengikuti bimker selama 14 bulan

Wawancara:

Saya: samean sudah berapa lama masuk di lapas mas?

I: setahun setengah mbak

Saya: sudah lama ikut bimker?

I: sekitar 14 bulan mbak

Saya: sebelumnya maaf kalau saya mengganggu waktunya ya mas?

I: gak apa-apa mbak

Saya: saya langsung ke pertanyaan yam as

I: iya mbak

Saya: gimana menurut samean pemahamannya tentang bimker, bimker itu gini apa itu gitu ta?

I: bimker ya menurut saya enak mbak, disini dibimbing dari yang gak tau bisa tau, diajari bikin kerajinan, diajari motong.

Saya: samean di bimker ikut kegiatan apa mas?

I: motong mbak

Saya: bisa mulai dari awal pas diluar apa pas disini mas?

I: mulai diluar mbak

Saya: terus kenapa tidak pilih program kegiatan yang lain mas? Kan banyak tuh kayak hadrah misalnya?

I: soalnya saya ngikuti keahlian saya mbak, diluar tukang potong jadi kok ada potong rambut jadi saya suka

Saya: ooo gitu, motong gitu dibayar gak mas?

I: iya dibayar mbak

Saya: untuk fasilitasnya sendiri gimana mas?

I: yang menyediakan bimker mbak

Saya: jadi semua pendanaannya dari bimker ya mas?

I: iya mbak

Saya: menurut samean ikut bimker ada manfaatnya gak mas?

I: manfaatnya disini apa ya?

Saya: ya mungkin lebih baik gitu mas

I: iya gak jenuh mbak, ya dari pada dikamar, gak ada kegiatan lebih baik ikut bimker aja mbak

Saya: oh gitu ya mas, terimakasih mas

I: sama-sama mbak

3. Anugrah: pengguna narkoba, di lapas sudah satu tahun setengah mengikuti bimker sudah 1 tahun

Wawancara:

Saya: maaf pak, bapak sudah berapa lama dilapas?

A: setahun setengah mbak

Saya: sudah berapa lama ikut bimker?

A: kurang lebih setahun mbak

Saya: alasannya ikut bimker apa pak?

A: biar dapet remisi mbak

Saya: remisi tersebut dari pusat atau lapas pak?

A: dari lapas mbak, karena sudah aktif mengikuti kegiatan dan sudah bersikap baik

Saya: kalau masalah CB atau PB dari lapas sendiri bagaimana pak?

A: kalau masalah itu kayaknya masih hambar mbak, gak tau lagi saya

Saya: oh gitu ya pak, saya langsung ke pertanyaan ya pak?

A: iya mbak

Saya: sepemahaman njenengan di bimker sendiri itu bagaimana? Kan njenengan sudah lama nih di bimker

A: kalau menurut saya bimker itu, gimana ya mbak...tempat kita untuk bersosialisasi dengan temen-temen, bisa mengisi kesibukan sehari-hari, kalau cuma masalah ekonomi ya memang kurang sih tapi dengan adanya bimker saya merasa lebih ada maknanya gitu saya disini, gak cuma tidur, nunggu hukuman selesai. Di bimker kita bisa kerja, walaupun kerjanya samean sudah tau sendiri seperti itu.

Saya: tapi kan bisa ada pemasukan dari situ pak?

A: iya yang sedikit itu sangat membantu sekali bagi saya dan temen-temen

Saya: gitu ya pak, kalau menurut njenengan ikut bimker ada manfaatnya gak pak?

A: kalau menurut saya sangat bermanfaat sekali buat menghilangkan jenuh mbak, biar sehari itu rasanya lebih pendek mbak, gak seperti saya waktu belum berada di bimker. Kalau sebelum saya berada di bimker itu gimana ya...rasanya waktu berjalan sangat lama mbak, berasa dikurung.

Saya: dulu sebelum di bimker pernah tidak mengikuti kegiatan apa-apa pak?

A: pernah, selama beberapa bulan saya tidak mengikuti kegiatan apa-apa.

Saya: bimker itu diwajibkan atau tidak sih pak?

A: tidak mbak, bimker di buka untuk umum sebenarnya mbak tapi untuk mereka yang berprestasi tapi kalau memang gak bisa dan semangat bekerja bisa diajarin mbak tapi kalau tidak ada semangat bekerja bisa jadi di tarik sama petugas mbak

Saya: berarti harus kemauan sendiri ya pak?

A: iya mbak, kalau kemauan sendiri kan pasti semangat buat bekerja mbak dan mau di atur sama petugasnya, dan dilihat kemampuannya apa, kemudian ditaruh dah sesuai dengan kemampuannya.

Saya: bermanfaat sekali berarti ya pak?

A: iya sangat mbak, kalau mungkin hukumannya hanya setahun dua tahun masih enak mbak, kalau seperti saya gak ada kegiatan ya jenuh, bisa setres nanti mbak, hehe

Saya: hehe iya pak, sekarang di sel sebelah mana pak?

A: saya di 1B, untuk narkoba semua ada di 1B kalau di C ada di 2C, tempatnya ditimur aula mbak.

Saya: kenapa kok di beda-bedakan pak?

A: saya gak tau ya mbak, masuk langsung di taruh di 1B, ngikut aja sudah saya mbak ditaruh dimana aja saya mau mbak, namanya di hukum ya mbak, gak ada hukuman yang enak.

Saya: iya pak, tapi kan tertolong dengan adanya kegiatan di bimker kan?

A: iya mbak, bimker saya akui memang tempat saya dan temen-temen untuk seneng-seneng, bisa dengerin musik, nonton tv, main jempalitan, olahraga bisa bebas mbak, walaupun tempatnya hanya segini ya lumayan mengurangi stres mbak, intinya harus manut aja sama petugasnya mbak, petugas-petugas disini semua sudah seperti saudara mbak, bukan seperti petugas yang semena-mena, kita punya keluhan apa-apa mereka yang kasih solusi.

Saya: oh gitu ya pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya ya pak, mohon maaf kalau pertanyaan saya ada yang menyinggung bapak

A: iya mbak sama-sama

4. Danny prasetyo: pengguna narkoba, dilapas sudah dua setengah tahun dan mengikuti bimker selama satu setengah tahun

Wawancara:

Saya: maaf pak, bapak sudah berapa lama dilapas?

D: dua tahun setengah mbak

Saya: sudah berapa lama ikut bimker?

D: setahun setengah mbak

Saya: saya mau tanya-tanya mengenai bimker boleh pak?

D: boleh mbak, mau tanya apa mbak?

Saya: menurut pemahaman bapak bimker itu bagaimana pak?

D: bimker itu tempat mengekspresikan apa yang ada didalam pikiran warga binaan yang ada disini jadi banyak yang bisa di ekspresikan disini dari pada bengong dikamar gitu kan, banyak berfikir negatif, kalau di bimker tentunya lebih berfikir positif dan dinamis.

Saya: oh gitu ya pak, sepertinya tataboga disini masih baru ya pak?sepertinya dulu blm pernah ada

D: hmmm iya mbak baru 6 bulan

Saya: oh baru 6 bulan pak, bapak kenapa sih kok pilih program kegiatan yang ada di bimker? Kan banyak tuh kegiatan lain pak

D: ya karena dibimker saya bisa mengekspresikan bakat saya mbak, saya kan suka masak

Saya: oh gitu pak, manfaatnya sendiri buat bapak apa?

D: ya itu tadi, disini lebih fleksibel ya, dimana kamu bisa berekspresi ya bisa tersalurkan disini, jadi banyak hal, disini kan bimker meliputi banyak kegiatan antara lain mengelas, kerajinan, tataboga, perikanan, pertanian, dan masih banyak lagi mbak

Saya: untuk warga binaan sendiri yang ingin mengikuti bimker ada tahapannya apa tidak pak? Atau terserah mau ikut boleh tidak ikut juga boleh?

D: terserah sih, siapapun mau ikut (warga binaan) berkegiatan di bimker boleh

Saya: syaratnya harus jadi narapidana dulu kan tapi pak?

D: iya tentunya

Saya: tahanan belum boleh ikut berarti pak?

D: ya gak bisa, karena belum warga binaan, masih tahanan belum dapat keputusan hukuman dari hakim, mereka kan masih tahanan kejaksaan tapi dititipkan disini (Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember)

Saya: oh gitu pak, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk saya bertanya-tanya ya pak

D: iya mbak sama-sama

LAMPIRAN D. ANALISIS DATA

KATEGORI	TRANSKIP WAWANCARA	REDUKSI DATA	DISPLAY DATA	KESIMPULAN/VERIFIKASI
<p>Kondisi awal warga binaan pemasyarakatan (mengenai bimbingan kerja)</p>	<p>“hmm..gimana ya..ramah lingkungan, gak pernah anu ya, buat sehari-hari, gimana ya mbak... bisa buat mengisi hari-hari yang kosong, disini buat ketrampilan, buat apa aja yang gak tau bisa jadi tau mbak, bisa buat jadi pengalaman lah. (informan tambahan H)”</p> <p>“ya iya, pertamanya ya gak bisa mbak, terus di ajarin pas bisa, kalau sekarang saya kerjanya. (informan tambahan H)”</p> <p>“bimker ya menurut saya</p>	<p>“kalau menurut saya bimker itu, gimana ya mbak...tempat kita untuk bersosialisasi dengan temen-temen, bisa mengisi kesibukan sehari-hari, kalau cuma masalah ekonomi ya memang kurang sih tapi dengan adanya bimker saya merasa lebih ada maknanya gitu saya disini, gak cuma tidur, nunggu hukuman selesai. Di bimker kita bisa kerja, walaupun kerjanya samean sudah tau sendiri seperti itu.(informan tambahan A)”</p>	<p>-bimker merupakan tempat untuk bersosialisasi warga binaan pemasyarakatan -bimker merupakan tempat untuk membuat ketrampilan warga binaan pemasyarakatan -bimker tempat warga binaan pemasyarakatan untuk mencari pengalaman -Bimker tempat warga binaan pemasyarakatan untuk berkreasi -bimker merupakan</p>	<p>Bimbingan kerja merupakan salah satu kegiatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember, bimbingan kerja merupakan tempat warga binaan pemasyarakatan untuk berkreasi dalam ketrampilan, bimbingan kerja menjadi tempat untuk bersosialisasi antar warga binaan pemasyarakatan ataupun warga binaan pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang merupakan tenaga ahli dalam pelatihan serta petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, di bimbingan kerja mereka dapat menghilangkan kejenuhan serta kegiatan kerja yang mereka ikuti dapat menjadi bekal untuk</p>

	<p>enak mbak, disini dibimbing dari yang gak tau bisa tau, diajari bikin kerajinan, diajari motong (informan tambahan I)”</p> <p>“kalau menurut saya bimker itu, gimana ya mbak... tempat kita untuk bersosialisasi dengan temen-temen, bisa mengisi kesibukan sehari-hari, kalau cuma masalah ekonomi ya memang kurang sih tapi dengan adanya bimker saya merasa lebih ada maknanya gitu saya disini, gak cuma tidur, nunggu hukuman selesai. Di bimker kita bisa kerja, walaupun kerjanya</p>	<p>“kalau menurut saya sangat bermanfaat sekali buat menghilangkan jenuh mbak, biar sehari itu rasanya lebih pendek mbak, gak seperti saya waktu belum berada di bimker. Kalau sebelum saya berada di bimker itu gimana ya... rasanya waktu berjalan sangat lama mbak, berasa dikurung. (informan tambahan A)”</p> <p>“iya mbak, bimker saya akui memang tempat saya dan temen-temen untuk seneng-seneng, bisa dengerin musik, nonton tv, main jempalitan, olahraga bisa bebas mbak, walaupun tempatnya</p>	<p>tempat warga binaan pemasyarakatan untuk berekspresi</p> <p>-bimker tempat menghilangkan jenuh warga binaan pemasyarakatan</p>	<p>kembali pada masyarakat.</p>
--	---	---	---	---------------------------------

	<p>samean sudah tau sendiri seperti itu.(informan tambahan A)”</p> <p>“kalau menurut saya sangat bermanfaat sekali buat menghilangkan jenuh mbak, biar sehari itu rasanya lebih pendek mbak, gak seperti saya waktu belum berada di bimker. Kalau sebelum saya berada di bimker itu gimana ya...rasanya waktu berjalan sangat lama mbak, berasa dikurung.(informan tambahan A)”</p> <p>“iya mbak, bimker saya akui memang tempat saya dan temen-temen</p>	<p>hanya segini ya lumayan mengurangi stres mbak, intinya harus manut aja sama petugasnya mbak, petugas-petugas disini semua sudah seperti saudara mbak, bukan seperti petugas yang semena-mena, kita punya keluhan apa-apa mereka yang kasih solusi. (informan tambahan A)”</p> <p>“bimker itu tempat mengekspresikan apa yang ada didalam pikiran warga binaan yang ada disini jadi banyak yang bisa di ekspresikan disini dari pada bengong dikamar gitu kan, banyak berfikir negatif, kalau di bimker</p>		
--	---	---	--	--

	<p>untuk seneng-seneng, bisa dengerin musik, nonton tv, main jempalitan, olahraga bisa bebas mbak, walaupun tempatnya hanya segini ya lumayan mengurangi stres mbak, intinya harus manut aja sama petugasnya mbak, petugas-petugas disini semua sudah seperti saudara mbak, bukan seperti petugas yang semena-mena, kita punya keluhan apa-apa mereka yang kasih solusi. (informan tambahan A)”</p> <p>“bimker itu tempat mengekspresikan apa yang ada didalam pikiran</p>	<p>tentunya lebih berfikir positif dan dinamis. (Infoman tambahan D)”</p>		
--	--	---	--	--

	<p>warga binaan yang ada disini jadi banyak yang bisa di ekspresikan disini dari pada bengong dikamar gitu kan, banyak berfikir negatif, kalau di bimker tentunya lebih berfikir positif dan dinamis. (Infoman tambahan D)”</p> <p>“ya karena dibimker saya bisa mengekspresikan bakat saya mbak, saya kan suka masak. (informan tambahan D)”</p> <p>“ya itu tadi, disini lebih fleksibel ya, dimana kamu bisa berekspresi ya bisa tersalurkan disini, jadi banyak hal, disini</p>			
--	--	--	--	--

	<p>kan bimker meliputi banyak kegiatan antara lain mengelas, kerajinan, tataboga, perikanan, pertanian, dan masih banyak lagi mbak.(informan tambahan D)”</p>			
<p>Perencanaan program bimbingan kerja</p>	<p>“ jadi kita itu mengambil dari kegiatan mereka waktu diluar, jadi untuk yang sudah memiliki kegiatan diluar misalnya ngelas ya diikutkan ke ngelas, bisa pertukangan ya dimasukan ke pertukangan, terus untuk mereka yang tidak memiliki keahlian khusus diluar kita tawarkan untuk mengikuti kegiatan</p>	<p>“ jadi kita itu mengambil dari kegiatan mereka waktu diluar, jadi untuk yang sudah memiliki kegiatan diluar misalnya ngelas ya diikutkan ke ngelas, bisa pertukangan ya dimasukan ke pertukangan, terus untuk mereka yang tidak memiliki keahlian khusus diluar kita tawarkan untuk mengikuti kegiatan yang</p>	<p>-mendata warga binaan pasyarakatatan yang ingin mengikuti kegiatan bimbingan kerja -mendata minat para warga binaan pasyarakatatan apabila kegiatan yang diinginkan telah diketahui maka melihat anggaran yang</p>	<p>Tahap perencanaan berisi tentang persiapan yang dilaksanakan sebelum program bimbingan kerja dimulai, diantaranya yaitu: pemeriksaan anggaran yang disediakan oleh kantor untuk pelaksanaan program bimbingan kerja, yang kedua menyiapkan program yang akan dibuat sesuai dengan minat dan bakat para warga binaan yang akan mengikuti agar tidak ada unsur pemaksaan, yang</p>

	<p>yang apa. Misalnya pak saya pingin bisa ngelas, ya kita arahkan kesana kalau yang pertukangan ya kita arahkan ke pertukangan, jadi kita tawarkan ke mereka dan disini tidak ada unsur memaksa, kalau dipaksakan hasilnya tidak akan bisa maksimal. (informan pokok E)”</p> <p>“ kita data dulu mbak, alamatnya, namanya, pidananya kita data dulu (informan pokok E)”</p> <p>“iya ada krikteria khususnya mbak yaitu semua warga binaan</p>	<p>apa. Misalnya pak saya pingin bisa ngelas, ya kita arahkan kesana kalau yang pertukangan ya kita arahkan ke pertukangan, jadi kita tawarkan ke mereka dan disini tidak ada unsur memaksa, kalau dipaksakan hasilnya tidak akan bisa maksimal. (informan pokok E)”</p> <p>“untuk persiapan program bimbingan kerja yang jelas kami sudah sangat siap, dari tempat, sarana dan prasarana sudah siap, tinggal ya itu kita membagikan narapidana ke keahliannya masing-masing. Seandainya tidak punya keahlian kami arahkan untuk mengikuti</p>	<p>disediakan oleh kantor -kemudian menyusun proposal untuk berjalannya program yang telah ditentukan -menyiapkan warga binaan pemasyarakatan yang akan mengikuti kegiatan bimbingan kerja karena tidak semua dapat mengikuti kegiatan bimbingan kerja</p>	<p>ketiga apabila sudah ada keputusan maka dibuatlah proposal untuk dilaksanakannya program bimbingan tersebut, kemudian yang keempat mendata warga binaan pemasyarakatan yang akan mengikuti program bimbingan kerja, tidak semua dapat mengikuti program bimbingan kerja karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember.</p>
--	--	--	--	--

	<p>yang baru jatuh dari tahanan, kami kumpulkan semua kemudian ditanya keahliannya masing-masing di apa, nanti kalau sudah ketemu diarahkan ke keahliannya masing-masing. (informan pokok M)”</p> <p>“untuk persiapan program bimbingan kerja yang jelas kami sudah sangat siap, dari tempat, sarana dan prasarana sudah siap, tinggal ya itu kita membagikan narapidana ke keahliannya masing-masing. Seandainya tidak punya keahlian kami</p>	<p>kegiatan yang mereka sukai. (informan pokok M)”</p> <p>“kita latih, yang penting ada niat untuk bekerja, contohnya seperti ini (seorang narapidana yang membuat kerajinan tangan) awalnya dia tidak punya keahlian tapi karena dia mempunyai niat untuk mengisi waktu dari pada harus nganggur-nganggur dia lihat temennya bikin kayak gitu akhirnya dia belajar dan akhirnya bisa. (informan pokok P)”</p> <p>“nah kalau tahapannya ini kan pertama kita lihat dari anggaran, yang kedua kita siapkan programnya apa,</p>		
--	---	--	--	--

	<p>arahkan untuk mengikuti kegiatan yang mereka sukai. (informan pokok M)”</p> <p>“ada, yang pertama niat atau keinginan bekerja kalau gak ada niat kita paksa-paksa seperti apapun ya gak bisa, pertama aja ikut kemudian lama kelamaan hilang gak mau datang lagi, kan percuma. Jadi yang pertama niat, niat untuk bekerja dia ada. (informan pokok P)”</p> <p>“kita latih, yang penting ada niat untuk bekerja, contohnya seperti ini (seorang narapidana yang</p>	<p>lalu kita siapkan proposalnya, terus kita siapkan WBPnya (warga binaan masyarakat) yang mau di pekerjaan berapa untuk pelatihan atau mengikuti program itu. Semua kita batasi, tidak semua dapat mengikuti program karena disini kan tempatnya juga sempit, tempatnya terbatas jadi kita batasi dan mereka kita batasi yang benar-benar mau bekerja dari pada harus bengong di kamar dan mikir yang negative.(informan pokok P)”</p> <p>“yang pertama kita memang disini kan sudah</p>		
--	---	---	--	--

	<p>membuat kerajinan tangan) awalnya dia tidak punya keahlian tapi karena dia mempunyai niat untuk mengisi waktu dari pada harus nganggur-nganggur dia lihat temennya bikin kayak gitu akhirnya dia belajar dan akhirnya bisa. (informan pokok P)”</p> <p>“yang pertama kita memang disini kan sudah ada beberapa <i>item</i> pekerjaan yang sudah ada, terus kita tambah lagi dengan beberapa <i>item</i> pekerjaan lagi. Pertama kali saya datang disini yang ada cuma <i>laundry</i>, terus tataboga</p>	<p>ada beberapa <i>item</i> pekerjaan yang sudah ada, terus kita tambah lagi dengan beberapa <i>item</i> pekerjaan lagi. Pertama kali saya datang disini yang ada cuma <i>laundry</i>, terus tataboga tapi waktu itu tataboga hanya penjualan jemblem, dan <i>babersop</i> mbak, hanya ada tiga <i>item</i> pekerjaan, begitu saya datang saya tambah <i>item</i> perikanan, pengelasan, tataboga yang warung itu sama saya tambah <i>bakery</i>, kerajinan-kerajinan dari kardus bekas, terus pertukangan, perkayuan itu juga saya hidupkan lagi, terus itu kemarin yang sempat</p>		
--	---	--	--	--

	<p>tapi waktu itu tataboga hanya penjualan jembem, dan <i>babersop</i> mbak, hanya ada tiga <i>item</i> pekerjaan, begitu saya datang saya tambah <i>item</i> perikanan, pengelasan, tataboga yang warung itu sama saya tambah <i>bakery</i>, kerajinan-kerajinan dari kardus bekas, terus pertukangan, perkayuan itu juga saya hidupkan lagi, terus itu kemarin yang sempat <i>vacum</i> pembuatan pavingblok dan saya hidupkan kembali. Alhamdulillah sekarang semua berjalan dengan lancar, sudah ada 9 <i>item</i>. Dan saya ini lagi</p>	<p><i>vacum</i> pembuatan pavingblok dan saya hidupkan kembali. Alhamdulillah sekarang semua berjalan dengan lancar, sudah ada 9 <i>item</i>. Dan saya ini lagi mempersiapkan untuk pelatihan pembuatan tempe, kita masih menyusun proposalnya. Kalau untuk pembiayaan berdasarkan dari dana anggaran kantor, dana untuk pelatihan itu sudah ada. Eh ada 10 <i>item</i> mbak, kerajinan bunga akrilik yang banyak dikerjakan di blok wanita tapi disini juga ada yang bisa mbak. Blok wanita juga saya karyakan mbak</p>		
--	---	--	--	--

	<p>mempersiapkan untuk pelatihan pembuatan tempe, kita masih menyusun proposalnya. Kalau untuk pembiayaan berdasarkan dari dana anggaran kantor, dana untuk pelatihan itu sudah ada. Eh ada 10 <i>item</i> mbak, kerajinan bunga akrilik yang banyak dikerjakan di blok wanita tapi disini juga ada yang bisa mbak. Blok wanita juga saya karyakan mbak (informan pokok P)”</p> <p>“nah kalau tahapannya ini kan pertama kita lihat dari anggaran, yang kedua kita siapkan programnya apa, lalu kita</p>	(informan pokok P)”		
--	--	---------------------	--	--

	<p>siapkan proposalnya, terus kita siapkan WBPnya (warga binaan masyarakat) yang mau di pekerjakan berapa untuk pelatihan atau mengikuti program itu. Semua kita batasi, tidak semua dapat mengikuti program karena disini kan tempatnya juga sempit, tempatnya terbatas jadi kita batasi dan mereka kita batasi yang benar-benar mau bekerja dari pada harus bengong di kamar dan mikir yang negative.(informan pokok P)”</p>			
Pelaksanaan	“ pelaksanaan program	“ pelaksanaan program	-program bimbingan	Dalam tahap pelaksanaan

<p>program bimbingan kerja</p>	<p>bimbingan kerja ya pas jam dinas <i>full</i>, kalau pas ada pesanan lebih bisa-bisa malah lembur mbak. (informan pokok M)”</p> <p>“ iya tapi kalau memang itu mendadak, seperti kemarin persiapan jfc itu sampai jam 12 malam mbak, gak apa-apa kan kita awasi secara benar mbak. (informan pokok M).”</p> <p>“nah kalau untuk pelaksanaan program itu yang pertama kalau misalnya itu pelatihan, awalnya itu dari pelatihan terus baru dijadikan program tetep,</p>	<p>bimbingan kerja ya pas jam dinas <i>full</i>, kalau pas ada pesanan lebih bisa-bisa malah lembur mbak. (informan pokok M)”</p> <p>“nah kalau untuk pelaksanaan program itu yang pertama kalau misalnya itu pelatihan, awalnya itu dari pelatihan terus baru dijadikan program tetep, itu kita bisa mendatangkan instruktur dari luar, instrukturnya itu kita mendatangkan dari orang-orang yang berkompeten atau ahli. Jadi misalnya kita mau bikin pelatihan pembuatan tempe,kita datangkan pengusaha tempe, jadi</p>	<p>kerja berawal dari kegiatan pelatihan dan kemudian dijadikan program tetap -program bimbingan kerja dilatih oleh instruktur dari luar yang ahli dalam bidangnya. -petugas hanya memantau jalannya program bimbingan kerja -bimbingan kerja dilaksanakan pada jam dinas kerja serta apabila ada yang belum terselesaikan maka dibolehkan untuk lembur dengan pengawasan oleh petugas.</p>	<p>program bimbingan kerja petugas bagian bimbingan kerja memantau jalannya program bimbingan kerja karena ada pihak ketiga yang melatih program bimbingan kerja, pelatih merupakan orang yang sudah ahli dalam bidangnya sehingga warga binaan pemsyarakatan dapat menyerap ilmu secara maksimal, pelaksanaan pelatihan program bimbingan kerja sudah disiapkan dari sarana dan prasarannya oleh petugas dan tidak ada unsur keterpaksaan warga binaan pemsyarakatan untuk mengikuti program bimbingan kerja karena program tersebut diambil dari kegiatan mereka diluar, serta apabila ada warga binaan yang ingin</p>
--------------------------------	---	---	---	--

	<p>itu kita bisa mendatangkan instruktur dari luar, instruktur nya itu kita mendatangkan dari orang-orang yang berkompeten atau ahli. Jadi misalnya kita mau bikin pelatihan pembuatan tempe, kita datangkan pengusaha tempe, jadi memang dia sudah memiliki bidang usaha tempe nanti kita undang untuk memberikan pelatihan dari awal sampai akhir seperti apa.(informan pokok P)”</p> <p>“kita hanya memantau berjalannya program mbak, karena ada tenaga-</p>	<p>memang dia sudah memiliki bidang usaha tempe nanti kita undang untuk memberikan pelatihan dari awal sampai akhir seperti apa.(informan pokok P)”</p>		<p>mengikuti program bimbingan kerja tetapi tidak memiliki keahlian maka akan diarahkan ke program bimbingan kerja yang disukai. Waktu pelaksanaan program bimbingan kerja dilaksanakan pada jam dinas pegawai<i>full</i>, apabila ada pekerjaan yang waktu penyelesaiannya harus selesai besok tetapi belum selesai maka diperbolehkan untuk lembur dengan pengawasan oleh petugas bimbingan kerja.</p>
--	--	---	--	--

	<p>tenaga ahli yang kami datangkan dari luar, agar warga binaan dapat menyerap ilmunya dengan maksimal, kami kan ada kerjasama dengan pihak-pihak luar juga, seperti garvita dan lain-lain. (informan pokok P)”</p>			
<p>Evaluasi program bimbingan kerja</p>	<p>“ada mbak, kita dua minggu sekali evaluasi kegiatan bimbingan kerja yang ada disini (Lembaga Pemasarakatan klas IIA Jember). (informan pokok M)”</p> <p>“semua ikut mbak, termasuk napi yang</p>	<p>“kalau tujuannya kita melakukan evaluasi itu ya memang untuk perbaikan jadi misalnya kita melakukan program pelatihan kok ternyata program pelatihan tersebut ada kekurangan disini baru kami evaluasi. Jadi nanti kedepannya ataupun nanti untuk tahap berikutnya</p>	<p>-program bimbingan kerja mengadakan evaluasi dua minggu sekali untuk memperbaiki kegiatan yang dianggap kurang ataupun bahan-bahan yang yang sudah habis maka dapat cepat teratasi.</p> <p>-semua mengikuti</p>	<p>Evalusi yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana program ini mencapai sasaran sesuai dengan rencana program. Evaluasi program bimbingan kerja dilakukan dua minggu sekali. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang mencangkup jangka panjang dan jangka pendek dengan melihat</p>

	<p>mengikuti kegiatan kerja. (informan pokok M)”</p> <p>“kalau tujuannya kita melakukan evaluasi itu ya memang untuk perbaikan jadi misalnya kita melakukan program pelatihan kok ternyata program pelatihan tersebut ada kekurangan disini baru kami evaluasi. Jadi nanti kedepannya ataupun nanti untuk tahap berikutnya agar dapat berjalan terus kita melakukan perbaikan jadi tau kekurangannya disini dan untuk evaluasi kita rutin dalam 2 minggu sekali. Jadi kita lihat perkembangan dari</p>	<p>agar dapat berjalan terus kita melakukan perbaikan jadi tau kekurangannya disini dan untuk evaluasi kita rutin dalam 2 minggu sekali. Jadi kita lihat perkembangan dari tiap item pekerjaan apakah ada kekurangannya atau tidak, misalnya kekurangan bahan jadi kita langsung bisa melakukan pemenuhan kekurangan tersebut.(informan pokok P)”</p>	<p>evaluasi termasuk warga binaan yang mengikuti program bimbingan kerja tetapi hanya perwakilan.</p>	<p>faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data berupa informasi tanggapan dari Warga Binaan Masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja sebagai bahan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan program bimbingan kerja, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari setiap program.</p>
--	--	--	---	---


	<p>tiap item pekerjaan apakah ada kekurangannya atau tidak, misalnya kekurangan bahan jadi kita langsung bisa melakukan pemenuhan kekurangan tersebut.(informan pokok P)”</p> <p>“semua mengikuti evaluasi, jadi memang setiap staf saya disini saya bebaskan pekerjaan itu dan mereka masing-masing sudah memenuhi tanggung jawab. Jadi seperti bu gustri itu dia mengurus kerajinan, nah dari mereka itu saya serahkan tanggung jawab untuk mengawasi dan</p>			
--	---	--	--	--

	<p>mengevaluasi, jadi kalau dalam 2 minggu saya panggil untuk laporan apa saja yang kurang dalam tiap item kerja dan bagaimana hasilnya, nah mereka laporannya itu ke saya kalau tidak langsung ke pak mamat, pak mamat itu kasubsinya bimbingan kerja dan pak mamat laporan ke saya tapi kadang-kadang dari staf laporan langsung ke saya juga tidak apa-apa. (informan pokok P)”</p>			
<p>faktor penghambat dan pendorong program</p>	<p>“bahan-bahan pokok yang untuk pelatihan itu lho, kita kan kendalanya disitu. Misalnya mereka</p>	<p>“ kendalanya ya dari narapidananya sendiri, kadang-kadang kan mereka juga males untuk</p>	<p>-faktor penghambat program bimbingan kerja yaitu, kurangnya sarana dan prasarana</p>	<p>Adapun faktor pendorong dan penghambat dilaksanakannya program bimbingan kerja antara lain:</p>

<p>bimbingan kerja</p>	<p>mengikuti pelatihan kerja ngelas ya, terus bahan seperti besinya dll itu kita yang kesulitan dan bahan produksi mereka kita juga kesulitan untuk memasarkan, jadi bisa bikin kita gak bisa jual. (informan pokok E)”</p> <p>“untuk warga binaan mengurangi kejenuhan mbak, kan menunggu hukuman pasti jenuh mbak. (informan pokok E)”</p> <p>“ada mbak, kendalanya ya dari narapidananya sendiri, kadang-kadang kan mereka juga males untuk berkreasi males</p>	<p>berkreasi males untuk berkeahlian jadi masih dijemput masih dipanggil-panggil. (informan pokok M)”</p> <p>“kalau kendala sih, pertama biasanya kita kalau untuk program yaitu dananya minim karena anggaran kantor jadi kita sebisa mungkin dengan anggaran minim tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, sama seperti jfc kemarin itu kita menggunakan dana yang minim tapi dengan hasil yang wow, lumayan bikin heboh. Ibu bupati saja sampai terkagum-kagum karena ternyata kita dari</p>	<p>yang disediakan oleh pelaksana kegiatan.</p> <p>-warga binaan masyarakatan yang malas untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja.</p> <p>-minimnya anggaran dari kantor</p> <p>-faktor pendorong kegiatan bimbingan kerja antara lain, warga binaan masyarakatan yang kreatif</p> <p>-mendapatkan premi agar warga binaan masyarakatan yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja semangat</p> <p>-warga binaan</p>	<p>a. Faktor pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Untuk warga binaan masyarakatan mengurangi kejenuhan 7. Untuk warga binaan masyarakatan agar dapat berfikir positif serta dapat berkreasi 8. Untuk warga binaan masyarakatan agar terampil dalam berkerja guna sebagai bekal apabila telah keluar dari Lembaga Masyarakatan 9. Pemberian premi untuk warga binaan masyarakatan agar lebih semangat 10. Dibantu dengan dana anggaran kantor untuk dapat berkreasi
------------------------	--	---	---	--

	<p>untuk berkeahlian jadi masih dijemput masih dipanggil-panggil. (informan pokok M)”</p> <p>“untuk faktor pendorong ya yang jelas kami ingin memberi kebebasan, maksudnya kalau orang-orang bikin kerajinan ketrampilan ini ya bisa dijual sendiri, didepan itu seandainya kerja dibelakang kami kasih premi mereka biar mereka juga semangat.(informan pokok M)”</p> <p>“kalau kendala sih, pertama biasanya kita kalau untuk program</p>	<p>lapas jember ikut berpartisipasi. Yang kedua biasanya dari anak-anaknya sendiri, biasanya nanti ada yang ditengah jalan gitu sudah tidak mau ikut lagi dengan berbagai macam alasan, biasanya karena alasan psikisnya terpengaruh dari keluarga misalnya istrinya minta cerai dan mungkin ada masalah keluarga yang lain kita tidak tau, nah itu biasanya terputus ditengah jalan. Biasanya sih kalau kita untuk tenaga ahli atau yang berkompeten insyaallah kita rekan banyak cuma ya gitu kadang-kadang mereka terkendala diwaktu jadi</p>	<p>pemasyaratan yang mengikuti bimbingan kerja dapat mengekspresikan dirinya pada kegiatan bimbingan kerja agar tidak bosan menunggu hukumannya selesai</p>	<p>c. Faktor penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Warga binaan pemasyarakatan malas untuk berkreasi 6. Warga binaan pemasyarakatan malas untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja 7. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan kerja 8. Dana anggaran dari kantor sangat minimal
--	---	--	---	--

	<p>yaitu dananya minim karena anggaran kantor jadi kita sebisa mungkin dengan anggaran minim tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, sama seperti jfc kemarin itu kita menggunakan dana yang minim tapi dengan hasil yang wow, lumayan bikin heboh. Ibu bupati saja sampai terkagum-kagum karena ternyata kita dari lapas jember ikut berpartisipasi. Yang kedua biasanya dari anak-anaknya sendiri, biasanya nanti ada yang ditengah jalan gitu sudah tidak mau ikut lagi dengan berbagai macam</p>	<p>kita menyesuaikan. Jadi kita kendalanya cuma itu saja.(informan pokok P)”</p> <p>“kalau faktor pendorong yang pertama itu kan dari WBPnya sendiri yang mau untuk bekerja, dan yang kedua kami didukung oleh anggaran walaupun minim terus yang ketiga kita rutinitas <i>continuenya</i> itu berjalan terus karena memang anak-anak ini yang sudah bisa suatu saat mereka bebas tapi kita sudah ada regenerasi, yang keempat ini karena anak-anak ini mendapatkan premi, premi itu istilahnya mereka mendapat bayaran dari hasil kerja mereka jadi</p>		
--	--	--	--	--

	<p>alasan, biasanya karena alasan psikisnya terpengaruh dari keluarga misalnya istrinya minta cerai dan mungkin ada masalah keluarga yang lain kita tidak tau, nah itu biasanya terputus ditengah jalan. Biasanya sih kalau kita untuk tenaga ahli atau yang berkompeten insyaallah kita rekan banyak cuma ya gitu kadang-kadang mereka terkendala diwaktu jadi kita menyesuaikan. Jadi kita kendalanya cuma itu saja.(informan pokok P)”</p> <p>“kalau faktor pendorong yang pertama itu kan dari</p>	<p>dari setiap item pekerjaan disini Alhamdulillah menghasilkan semua, nah dari keuntungan yang kita dapat itu pasti kita bagi dua, yang pertama untuk PNBP jadi PNBP yang disetorkan di Negara dan yang kedua kami serahkan untuk premi anak-anak. Disini premi ada dua macam yaitu bentuk barang contohnya makan minum kami yang tanggung dan bentuk uang tapi di berikan waktu sudah keluar. (informan pokok P)”</p> <p>“untuk faktor pendorong ya yang jelas kami ingin memberi kebebasan,</p>		
--	--	--	--	--

	<p>WBPnya sendiri yang mau untuk bekerja, dan yang kedua kami didukung oleh anggaran walaupun minim terus yang ketiga kita rutinitas <i>continuenya</i> itu berjalan terus karena memang anak-anak ini yang sudah bisa suatu saat mereka bebas tapi kita sudah ada regenerasi, yang keempat ini karena anak-anak ini mendapatkan premi, premi itu istilahnya mereka mendapat bayaran dari hasil kerja mereka jadi dari setiap item pekerjaan disini Alhamdulillah menghasilkan semua, nah dari keuntungan yang</p>	<p>maksudnya kalau orang-orang bikin kerajinan ketrampilan ini ya bisa dijual sendiri, didepan itu seandainya kerja dibelakang kami kasih premi mereka biar mereka juga semangat.(informan pokok M)”</p>		
--	--	--	--	--

	<p>kita dapat itu pasti kita bagi dua, yang pertama untuk PNBP jadi PNBP yang disetorkan di Negara dan yang kedua kami serahkan untuk premi anak-anak. Disini premi ada dua macam yaitu bentuk barang contohnya makan minum kami yang tanggung dan bentuk uang tapi di berikan waktu sudah keluar. (informan pokok P)”</p>			
--	--	--	--	--

LAMPIRAN E. DOKUMENTASI



Gambar 1. Pembuatan Kerajinan dari kardus bekas



Gambar 2. Hasil Kerajinan dari kayu



Gambar 3. Proses pembuatan kostum JFC 2018



Gambar 4. Kostum JFC 2018 karya Warga Binaan Pemasarakatan



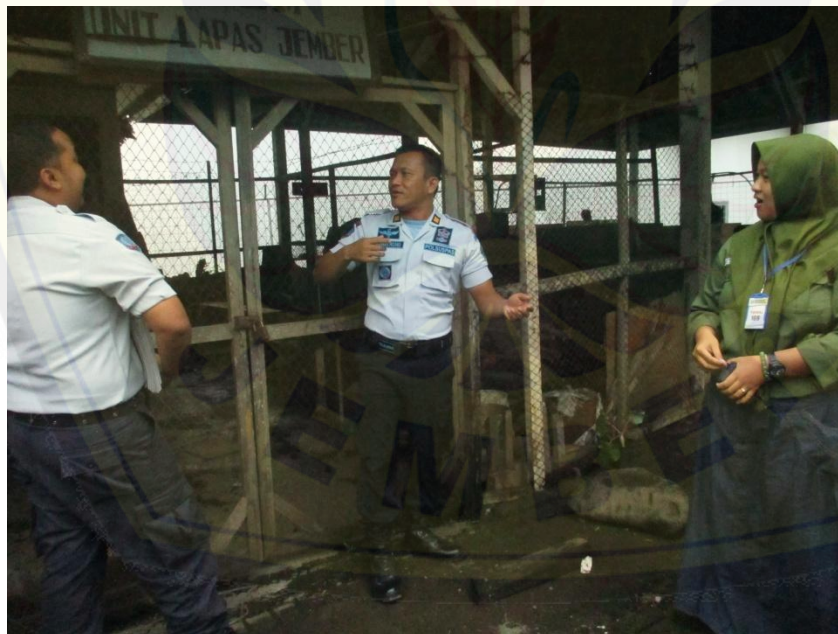
Gambar 5. Proses Pembuatan Jemblem (Tataboga)



Gambar 6. *Barbershop*



Gambar 7. Struktur Kegiatan Bimbingan Kerja



Gambar 8. Proses Wawancara Dengan Informan Pokok



Gambar 9. Wawancara dengan informan tambahan



Gambar 10. Wawancara dengan informan tambahan




Gambar 11. Wawancara dengan informan tambahan



Gambar 12. Wawancara dengan informan tambahan

LAMPIRAN F. SURAT IJIN PENELITIAN DARI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1160/UN25.3.1/LT/2018 16 Maret 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

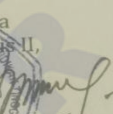
Yth. **Kepala**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1008/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,


Nama : Kunti Dhorifah
NIM : 140910301015
Fakultas : ISIP
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Karanganyar, Ambulu-Jember
Judul Penelitian : "Implementasi Program Bimbingan Kerja Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Kabupaten Jember"
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Kabupaten Jember
Lama Penelitian : 2 Bulan (15 Maret-30 Mei 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


D. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
1. Kepala LP Kelas II-A Kab. Jember;
2. Dekan FISIP Univ Jember;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.


Certificate No. : QMS/173

**LAMPIRAN G. SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN
PENELITIAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
JEMBER**

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER
Jl. PB. Sudirman No.13 Jember, Telp. (0331) 487244, Fax (0331) 487850
Email : lapas_jember@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : W15.PAS.PAS.6.HM.05.04 - 46

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Kunti Dhorifah
NIM : 140910301015
Fakultas : Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Universitas Negeri Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “ Implementasi Program Bimbingan Kerja terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember ” mulai bulan Juni s.d bulan Agustus 2018 dengan hasil baik.


Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Agustus 2018
A.n Kepala
Ka. Subag Tata Usaha

Drs. SUSILO
NIP.19610919 198103 1001



LAMPIRAN H. CONTOH SURAT REKOMENDASI UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGIKUTI PROGRAM BIMBINGAN KERJA



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER
Jl. PB. Sudirman No 13 Jember
Kotak Pos 101–Kode Pos 68118-Telp. : (0331) 487244 Fax : 487850

SURAT REKOMENDASI
TERDAFTAR MENGIKUTI PELATIHAN
PEMBINAAN KEMANDIRIAN

Dengan ini merekomendasikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tercantum di bawah ini terdaftar mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian yang di laksanakan oleh seksi kegiatan kerja.

Nama : Ahmad Saini
No.Reg : B II A 426/2017
Pasal/perkara : 7 UU RI NO.45 Tahun 2009
Lama pidana : 10 bulan
Alamat : Dsn. karang kokap RT./RW. 03/03
Ds. Sruni.
Kec. Jenggawa.
kab. Jember

Jenis kegiatan : Tata boga
Demi untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kemandirian maka akan di lakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya, harap menjadikan periksa.

PLH.Kasi Kegiatan Kerja

Jember, 26 Oktober 2017
Pembimbing Pelatihan

MAMATRONO,SH
NIP.19740618 200003 1 001

GUSTRI PANDU MARCAHYANA,SH
NIP.1989080 3200801 2 001

Mengetahui
Kalapas Kelas II A Jember

SARJU WIBOWO Bc.IP.SH.MH
NIP. 19610904 198503 1 001